



MODEL

**A**

# PEDOMAN

# MODEL REVITALISASI BAHASA DAERAH







MODEL

**A**

# PEDOMAN

# MODEL REVITALISASI BAHASA DAERAH



Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

2022

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**PEDOMAN REVITALISASI BAHASA DAERAH  
MODEL A**

# PEDOMAN REVITALISASI BAHASA DAERAH MODEL A

Pengarah  
**E. Aminuddin Aziz**  
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Penanggung Jawab  
**Imam Budi Utomo**  
Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Penyusun  
**Yulianeta dan Dadan Sutisna**

Pembantu Penyusun  
**Ririen Ekoyanantiasih, Inayatusshalihah, dan Evi Noviani**

Penyelaras  
**Ganjar Harimansyah dan Anita Astriawati Ningrum**

Pendesain dan Pengatak  
**Nurjaman**

**Ukuran:** 14x20 cm

**ISBN :**  
No ISBN

**Cetakan Pertama :**  
Juni 2022

**Hak Cipta ©2022 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

# SAMBUTAN

## KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Indonesia merupakan negara kedua setelah Papua Nugini yang kaya dengan bahasa daerah. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Indonesia memiliki 718 bahasa daerah. Bagi bangsa Indonesia, bahasa daerah sesungguhnya merupakan aset. Ia merupakan salah satu kekayaan kultural bangsa Indonesia yang berbineka. Kelahiran bangsa Indonesia tidak terlepas dari keberagaman budaya yang ada di dalamnya, termasuk bahasa-bahasa setiap suku bangsa dan kelompok masyarakat tutur yang lebih kecil.

Merawat dan memperlakukan aset takbenda seperti bahasa daerah tentu saja berbeda dengan cara melihat aset berupa benda. Bahasa daerah merekam kearifan lokal, khazanah pengetahuan dan kebudayaan, serta kekayaan batin penuturnya. Kepunahan bahasa daerah sama artinya dengan hilangnya aset-aset takbenda yang terekam di dalam bahasa daerah tersebut.

Lebih dari tiga perempat bahasa daerah terdapat di wilayah timur Indonesia, dengan jumlah penutur yang rata-rata sedikit. Akibatnya, ancaman kepunahan bahasa-bahasa daerah seperti ini menjadi sangat kuat. Situasinya akan makin parah kalau tidak ada keberpihakan dari penuturnya dan dari pemerintah daerah setempat. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengembangan dan perlindungan bahasa, sastra, dan aksara daerah adalah tanggung jawab pemerintah daerah.

Paling sedikit, ada empat faktor penyebab kemunduran atau bahkan kepunahan bahasa daerah. Pertama, sikap penutur bahasa daerah terhadap bahasanya. Kedua, migrasi atau mobilitas sosial yang tinggi. Ketiga, adanya perkawinan dengan pasangan yang berbeda bahasa. Keempat, bencana atau musibah yang menyebabkan berkurangnya penutur bahasa daerah. Dari keempat faktor itu, sikap penutur bahasa kepada bahasa daerahnya menjadi penyumbang terkuat terhadap kepunahan sebuah bahasa daerah. Ketika para penutur bahasa daerah melihat bahasa daerahnya tidak lagi fungsional, kurang bergengsi, tidak keren, atau bahkan kampungan, keadaan dan cara pandang seperti itu menjadi pintu gerbang pertama bagi bahasa daerah untuk memasuki keranda matinya.

Telah banyak upaya pelestarian bahasa daerah yang dilakukan. Pemerintah pusat, melalui Badan Bahasa dan unit pelaksana teknisnya di 30 provinsi, banyak

melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan setempat. Upaya itu bukan tidak berhasil, melainkan belum optimal. Tampaknya, kekurangoptimalan itu terjadi karena perlindungan bahasa daerah belum dilandasi pemikiran yang komprehensif/holistik dan integratif. Dikatakan tidak komprehensif karena hanya mengambil bagian kecil dari perlindungan bahasa, yaitu mendokumentasikan aspek kebahasaan dan mementaskan sastra lokal bersama masyarakat tutur.

Sehubungan dengan itu, inisiatif untuk mengubah arah dan praktik perlindungan bahasa daerah mulai digulirkan Badan Bahasa. Pelindungan bahasa yang awalnya lebih dipahami sebagai bentuk proteksi dibuat lebih dinamis melalui konsep revitalisasi. Upaya ini dilakukan sebagai cara menghidupkan kembali hasrat dan minat penutur bahasa daerah untuk menggunakan bahasanya. Pendekatan revitalisasi ini dilakukan dengan model revitalisasi dengan tetap memperhatikan karakteristik daerah dan bahasanya. Bahkan, untuk memperkuat upaya ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Merdeka Belajar Episode Ke-17 yang bertajuk Revitalisasi Bahasa Daerah pada Selasa, 22 Februari 2022. Peluncuran kebijakan ini bertepatan dengan momen Hari Bahasa Ibu Internasional pada 21 Februari 2022. Revitalisasi yang diusung Kemendikbudristek ini merupakan pendekatan baru untuk revitalisasi bahasa daerah di Indonesia.

Untuk mendapat pemahaman lebih komprehensif perihal revitalisasi bahasa daerah, kehadiran buku *Pedoman Revitalisasi Bahasa Daerah* ini tentu sangat urgen. Sebagai pedoman, buku ini tidak hanya dipakai oleh para pihak di lingkungan Badan Bahasa, tetapi dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan di pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Kehadiran pedoman ini tentu saja sangat berarti agar upaya revitalisasi bahasa daerah menjadi kerja bersama yang integratif dan berkelanjutan.

Kepala,

E. Aminudin Aziz

# DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA _____	v
DAFTAR ISI _____	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> _____	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang _____	1
1.2 Dasar Hukum _____	2
1.3 Tujuan _____	3
1.4 Sasaran _____	4
1.5 Ruang Lingkup _____	4
1.6 Indikator Keberhasilan _____	4
<b>BAB II KONSEP DASAR REVITALISASI BAHASA DAERAH</b> _____	<b>7</b>
2.1 Isu Global Pelindungan Bahasa Daerah _____	7
2.2 Dampak Globalisasi pada Situasi Kebahasaan di Indonesia _____	13
2.2.1 Jumlah dan Vitalitas Bahasa Daerah di Indonesia _____	16
2.2.2 Situasi triglosik _____	25
2.3 Pelindungan Bahasa Daerah _____	28
2.4 Praktik Pelindungan Bahasa _____	33
<b>BAB III PENDEKATAN BARU REVITALISASI BAHASA DAERAH MODEL A</b> _____	<b>39</b>
3.1 Konsep Dasar Revitalisasi Bahasa Model A _____	39
3.2 Kurikulum dan Materi Revitalisasi Bahasa Daerah Model A _____	40
3.3 Kemitraan _____	48
3.4 Implementasi Revitalisasi Bahasa Daerah Model A _____	50
3.5 Pengendalian Mutu _____	52
<b>BAB IV PENUTUP</b> _____	<b>57</b>



## 1.1 Latar Belakang

Pelindungan bahasa-bahasa lokal—dalam konteks bahasa Indonesia disebut bahasa daerah—menjadi isu penting dan mulai mendapat perhatian internasional ketika bahasa-bahasa di dunia mulai banyak yang punah. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) memperkirakan sekitar 3.000 bahasa daerah/lokal akan punah di akhir abad ini. Hanya separuh dari jumlah bahasa yang dituturkan oleh penduduk dunia saat ini yang masih akan eksis pada tahun 2100 nanti.

Indonesia sebagai negara yang memiliki lebih dari 718 bahasa—terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini (839 bahasa; Evans, 2009)—mempunyai kewajiban untuk melindungi bahasa daerah dari kepunahan. Tugas ini tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 32, yang mengamanatkan bahwa menghormati dan memelihara bahasa daerah merupakan upaya menjaga kekayaan budaya nasional.

Pelindungan bahasa daerah—termasuk sastra di dalamnya—merupakan tanggung jawab kita bersama. Selain masyarakat pemilik bahasa dan sastra itu sendiri, pemerintah pun tentu ikut hadir dalam usaha pelindungan ini, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 (UU RI No. 24/2009) dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 (PP No. 57/2014). Teks UU No 24/2009 dan PP 57/2014 sangat signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Signifikansinya terletak pada isi peraturan perundang-undangan tersebut yang mengukuhkan kedudukan bahasa sebagai simbol dan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi suatu bangsa.

Dari berbagai upaya perlindungan bahasa daerah, program revitalisasi bahasa daerah merupakan tahapan strategis setelah upaya pemetaan bahasa, pengukuran daya hidup/vitalitas bahasa, dan upaya konservasi bahasa. Revitalisasi bahasa daerah—yang dimotori Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)—merupakan salah satu dari program perlindungan bahasa daerah yang bertujuan untuk menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranah kehidupan sehari-hari dan meningkatkan jumlah penutur muda bahasa daerah.

Revitalisasi bahasa daerah secara umum diartikan sebagai upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah melalui pewarisan kepada generasi muda untuk mendorong penggunaannya dalam komunikasi yang beragam sehingga daya hidup bahasa daerah tersebut pada taraf aman dan ditransmisikan dengan baik. Revitalisasi tersebut dapat dilaksanakan dengan berbasis sekolah, komunitas, atau berbasis keluarga.

Langkah perlindungan bahasa daerah melalui revitalisasi harus didukung oleh adanya pedoman dan petunjuk teknis revitalisasi bahasa. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan perevitalisasi, baik yang ada di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maupun lembaga/pihak lain di Indonesia yang melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa. Dengan demikian, kegiatan revitalisasi bahasa dapat berjalan optimal dan berkesinambungan dengan koordinasi yang jelas dan terarah sesuai dengan peta jalan upaya perlindungan bahasa daerah.

## 1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 32, Ayat 2).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan

- Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157).
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa.
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2016 Rincian Tugas Kantor Bahasa.
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020—2024.
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019.
  12. Peraturan Mendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

### 1.3 Tujuan

Tujuan pedoman ini adalah untuk memberikan penjelasan prosedur pelaksanaan implementasi model revitalisasi bahasa daerah di lingkungan Badan Bahasa, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti perguruan tinggi dan komunitas penutur.

## 1.4 Sasaran

Sasaran pedoman ini adalah pelaksana revitalisasi bahasa daerah di lingkungan Badan Bahasa, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti perguruan tinggi dan komunitas penutur.

## 1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah meliputi (1) langkah kerja dan (2) tahapan aksi kegiatan revitalisasi bahasa daerah.

## 1.6 Indikator Keberhasilan

Secara umum, indikator keberhasilan pelaksanaan revitalisasi bahasa mencakup hal berikut.

1. Mendapat dukungan dan sambutan baik dari masyarakat dan pemerintah daerah yang ditandai dengan partisipasi masyarakat, pimpinan daerah, tokoh agama, dan tokoh adat pada saat festival/pertunjukan hasil revitalisasi bahasa dan sastra;
2. didukung pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, mulai dari tingkat dusun/desa, kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten/kota, bahkan tingkat provinsi dengan dibuatnya peraturan/nota komitmen tentang perlindungan bahasa dan sastra di daerah tersebut;
3. perguruan tinggi terlibat dalam revitalisasi sebagai bentuk implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), khususnya program MBKM Revitalisasi Bahasa Daerah;
4. dinas pendidikan dan sekolah-sekolah terlibat dalam revitalisasi sebagai bentuk implementasi program Merdeka Belajar: Revitalisasi Bahasa Daerah (untuk revitalisasi berbasis sekolah); dan
5. hasil revitalisasi bahasa dan sastra teraktualisasi di lingkungan masyarakat, sekolah, ataupun komunitas tutur, salah satunya ada bukti melalui nota kesepahaman.

Secara khusus, revitalisasi bahasa dikatakan berhasil jika ada indikator berikut (lihat Crystal, 2000: 130—141).

1. Berdampak positif pada masyarakat penuturnya;
2. prestise atau pamor bahasa tersebut meningkat dalam masyarakatnya dan masyarakat sekitarnya yang berbeda bahasa;
3. kepercayaan diri dan kekuatan legitimasi masyarakat meningkat, terutama pengaruh masyarakat tersebut kepada kelompok masyarakat lainnya;
4. bahasa tersebut mendapat dukungan kuat dalam sistem pendidikan;
5. masyarakat penutur bahasa dapat menuliskan bahasanya; dan
6. bahasa tersebut dapat dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi.



## BAB II

# KONSEP DASAR REVITALISASI BAHASA DAERAH

## 2.1 Isu Global Pelindungan Bahasa Daerah

Modernisasi dan globalisasi telah meningkatkan taraf kehidupan manusia, tetapi seiring dengan itu kekayaan dan keragaman bahasa dan budaya kita semakin menurun. Selain isu pemanasan global, kepunahan bahasa menjadi krisis paling akut di bumi ini. Bahkan, laman World Economic Forum (WEF, <https://www.weforum.org>) memasukkan masalah kepunahan bahasa sebagai isu penting dalam agenda global WEF. Isu global itu seputar (1) kepunahan sekitar 1.500 bahasa yang ada sekarang dan mungkin tidak lagi digunakan pada akhir abad ini, (2) tingkat kepunahan bahasa saat ini bisa tiga kali lipat dalam empat puluh tahun ke depan, dan (3) tingkat pendidikan dan mobilitas yang tinggi telah meminggirkan beberapa bahasa minoritas. Jika isu ini tidak sama-sama menjadi agenda penting dan tanpa intervensi, satu bahasa per bulan bisa hilang (Wood, 2022).

Beberapa pakar bahasa dari berbagai negara telah mengingatkan tentang ancaman kepunahan bahasa. Salah satunya dari Steinhauer (1994) yang mengatakan bahwa dari 6.000 bahasa yang digunakan di seluruh dunia, antara 500 hingga 1.000 bahasa hanya diucapkan oleh segelintir orang. Selain itu, setiap tahunnya dunia kehilangan sekitar 25 bahasa ibu. Itu sama saja dengan kehilangan 250 bahasa selama satu dekade. Ini sebuah prospek yang menyedihkan bagi sebagian orang.

Sebuah bahasa dinyatakan punah ketika tidak ada lagi yang bisa berbicara dengan bahasa itu. Kepunahan bahasa dapat terjadi ketika generasi muda tidak lagi berbicara bahasa. Dapat diprediksi dalam tiga generasi berikutnya, jumlah penutur menurun tajam karena generasi terakhir yang fasih menjadi orang tua, kakek-nenek, dan akhirnya hanya generasi orang-orang tua yang fasih berbicara dengan bahasanya. Saat para tetua itu

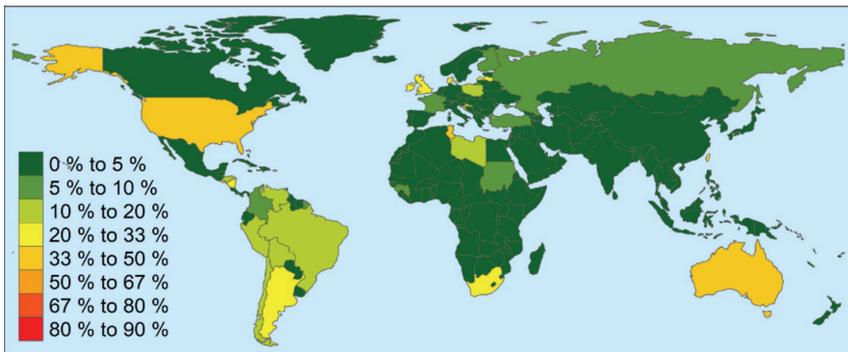
meninggal, bahasa itu menjadi tidak aktif atau punah. Upaya revitalisasi yang terprogramlah yang dapat menyelamatkan bahasa tersebut.

Gary F. Simons (2019) telah memetakan dan membuat persentase dan prediksi situasi kepunahan bahasa lokal di berbagai negara—artikel ini disebarakan juga secara masif oleh The Language Conservancy (TLC), organisasi yang didirikan pada tahun 2005 oleh peneliti lapangan dan aktivis yang peduli terhadap bahasa lokal di Amerika Serikat. Sebagai contoh, di dalam Gambar 1—5 dapat dilihat bagaimana persentase bahasa yang tidak aktif atau punah dalam tiga generasi dari kurun waktu 1920-an hingga awal abad ke-21. Gambar-gambar tersebut mengilustrasikan penyebaran kepunahan bahasa secara global saat ini. Penyebaran kepunahan tersebut dapat dilihat dari perubahan warna hijau tua menjadi hijau muda lalu ke warna kuning, kemudian ke oranye, dan menjadi merah.

Gambar 1—5 tersebut merangkum keadaan daya hidup atau vitalitas bahasa saat ini di seluruh dunia dengan menunjukkan distribusi level EGIDS (expanded graded intergenerational disruption scale) untuk 7.268 bahasa. Sebanyak 4.035 (atau 55,5%) dari bahasa yang digunakan pada tahun 1700 tetap digunakan secara aktif sampai sekarang. Sebanyak 1.483 (atau 20,4%) bahasa kehilangan penuturnya karena pergeseran bahasa, tetapi bahasa tersebut masih digunakan oleh generasi termuda (diwakili oleh warna kuning). Ada 1.049 (atau 14,4%) dari bahasa-bahasa tersebut masih memiliki penutur dari generasi pertama yang masih hidup, tetapi kemungkinan besar akan punah karena tidak lagi digunakan oleh kaum mudanya (warna merah). Akhirnya, 701 (atau 9,6%) bahasa yang hidup pada tahun 1700 sekarang tidak aktif lagi atau punah yang digambarkan dalam warna hitam. Dari skala pengukuran vitalitas bahasa EGIDS ini, terdapat tiga hal penting, yakni pengelompokan (1) bahasa yang tergolong “aman” meliputi keragaman situasi bahasa, (2) bahasa yang berada di bawah kategori “aman” terdefiniskan dengan baik sehingga bisa menjadi perhatian pada program revitalisasi, dan (3) mempunyai rentang penilaian yang fleksibel sehingga bisa dipakai untuk mengukur seluruh bahasa yang ada di dunia.

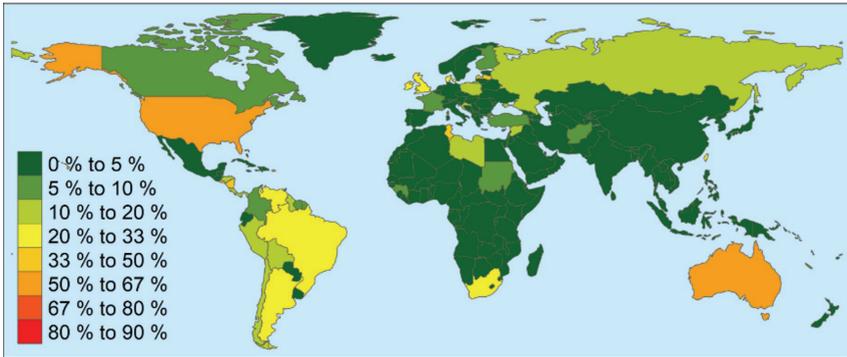
Pada Gambar 1, misalnya, bingkai awal, hijau tua mendominasi dengan kurang dari sepuluh negara yang mulai berubah warna. Warna hijau menggambarkan bahasa yang masih digunakan oleh semua penutur, warna kuning menggambarkan bahasa yang kehilangan penuturnya, warna merah menggambarkan bahasa yang tidak lagi digunakan oleh generasi

mudanya, dan warna hitam mengilustrasikan bagaimana penutur fasih terakhir telah meninggal. Pada 1920-an tersebut, kepunahan bahasa terjadi pada separuh bahasa asli di Australia, Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Argentina. Bahasa-bahasa di negara ini tidak berdaya menghadapi kolonisasi pemukiman yang “mencerabut” masyarakat adat dari tanah mereka sendiri dan menyebabkan hilangnya bahasa mereka. Namun, di beberapa wilayah dunia lain yang mengalami penjajahan dan eksploitatif sumber daya, tetapi bukan yang menimbulkan pemindahan pemukiman, tidak menghadapi gelombang seperti itu. Ilustrasi kepunahan di berbagai negara tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



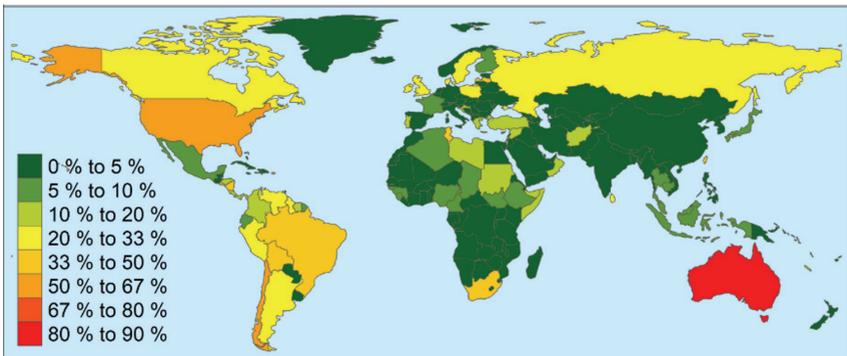
Gambar 1 Kepunahan Bahasa di Era 1920-an

Pada pertengahan abad ke-20, gerakan nasionalisme, urbanisasi, dan globalisasi mulai memperlihatkan dampak negatif terhadap bahasa-bahasa di dunia, seperti terlihat pada Gambar 2. Urbanisasi yang sejalan dengan kolonisasi pemukiman berefek menjauhkan masyarakat dari daerah asalnya. Mereka meninggalkan tempat asalnya dan tidak melalui pemukiman kembali secara paksa, tetapi secara sukarela berangkat dari pedesaan dan bermigrasi ke kota-kota. Kondisi ini menyebabkan mereka beradaptasi dan berbicara dengan bahasa yang dominan di tempat baru untuk mengambil bagian dalam perekonomian.



Gambar 2 Kepunahan Bahasa di Era 1940-an

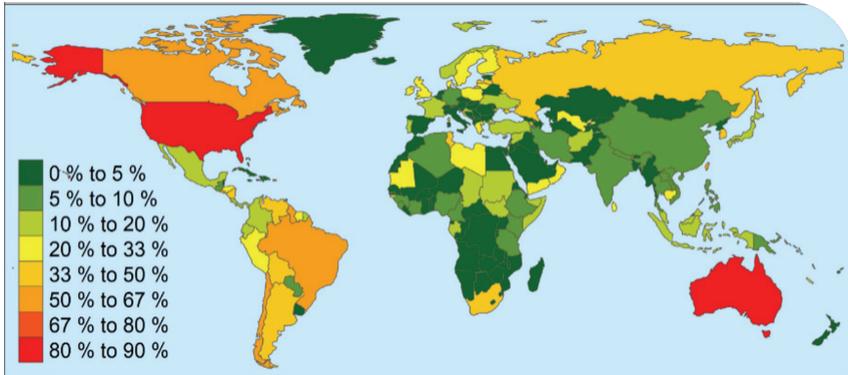
Gambar 3. mengilustrasikan bagaimana bahasa-bahasa di dunia sampai sepertiga akhir abad kedua puluh mengalami penurunan jumlah penutur dan pemakaiannya. Penyebabnya antara lain, adanya kebijakan pemerintah, terutama di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, yang “melucuti” identitas masyarakat adat melalui pendidikan ke dalam identitas budaya nasional yang lebih besar. Sekolah-sekolah di negara-negara itu berhasil mengasimilasi dan mengakulturasi anak-anak dengan mencegah mereka berbicara bahasa ibu mereka. Kebijakan ini memperlambat dan akhirnya menghentikan transmisi antargenerasi dari beberapa bahasa mereka.



Gambar 3 Kepunahan Bahasa pada Tahun 1970-an

Selama seperempat terakhir abad kedua puluh, seperti terlihat pada Gambar 4, kebijakan nasional bergeser atau mulai bergeser untuk mendorong anak-anak berbicara bahasa daerah/lokal mereka. Namun, permasalahan

pendanaan di berbagai negara untuk revitalisasi bahasa tetap pada tingkat yang rendah sementara gangguan terhadap transmisi antargenerasi terus terjadi. Kondisi itu diperparah dengan munculnya dominasi bahasa Inggris dan bahasa nasional lainnya yang mengakibatkan makin sedikit anak-anak yang menuturkan bahasa daerah/lokal mereka. Pada tahun-tahun tersebut revitalisasi bahasa belum menjadi isu yang menyita perhatian berbagai negara.

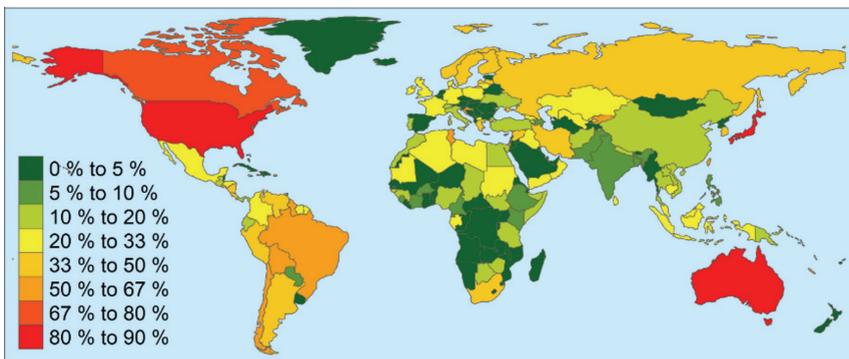


Gambar 4 Kepunahan Bahasa pada Tahun 1990-an

Sepuluh tahun terakhir pada abad ke-21 ini, seperti terlihat pada Gambar 5, sebanyak 61% bahasa di seluruh dunia yang digunakan sebagai bahasa pertama pada tahun 1795 akan punah. Setakat ini diduga sebanyak sembilan bahasa setahun atau satu bahasa setiap empat puluh hari tidak lagi digunakan. Pada tahun 2080, angka tersebut akan meningkat menjadi 16 bahasa per tahun. Pada pertengahan abad berikutnya, kita akan kehilangan warisan bahasa kita dengan kecepatan 26 bahasa setiap tahun—satu bahasa akan punah setiap dua minggu. Jika kita tidak mengatasi masalah kepunahan bahasa ini, lebih dari setengah bahasa di dunia akan punah dalam 100 tahun ke depan. Meskipun pemerintah dan para pemangku kepentingan di seluruh dunia makin sadar akan krisis kepunahan bahasa, banyak pembuat kebijakan di berbagai negara belum mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk secara substansial mengatasi gelombang kepunahan yang akan segera datang.

Meskipun para pembuat kebijakan belum maksimal mengarahkan sumber dayanya untuk mengatasi isu global kepunahan bahasa, Grenoble dan Whaley (2005: 1—20) mengatakan bahwa selama lima puluh tahun terakhir dan dengan frekuensi yang semakin meningkat, program-program inovatif telah muncul di seluruh dunia dengan tujuan untuk merevitalisasi bahasa-bahasa yang terancam punah. Mereka mengatakan hal ini berdasarkan pengalaman mereka dalam upaya revitalisasi melalui kerja lapangan di Asia Timur dan hasil kolaborasi profesional dengan peneliti di Afrika, Amerika Selatan, dan Amerika Utara, khususnya Amerika Serikat.

Upaya revitalisasi yang telah dilakukan selama ini menunjukkan beberapa fakta penting. Pertama, meskipun banyak ditemukan kesamaan penyebab hilangnya bahasa di seluruh dunia, bukan berarti pendekatan serupa dalam revitalisasi bahasa dapat dilakukan untuk semua bahasa. Kedua, upaya revitalisasi ini sangat bervariasi sesuai dengan kekhasan bahasa yang menjadi target mereka. Dalam beberapa kasus, upaya itu dapat dilakukan dalam lingkup nasional, seperti perlindungan bahasa di Irlandia, tetapi dalam kasus lain mereka melibatkan komunitas kecil atau bahkan segelintir individu dalam sebuah keluarga. Banyak dari program ini terkait dengan masalah kewenangan daerah atau teritorial, meski kedaulatan budaya atau keinginan untuk mempertahankan identitas etnis yang unik seringkali menjadi tujuan bersama. Di sisi lain, dalam konteks tertentu upaya revitalisasi dapat dipusatkan di sekolah-sekolah melalui pendidikan formal.



Gambar 5 Kepunahan Bahasa Era Sekarang

Di tengah keragaman metode dan motif untuk melestarikan bahasa sebagai masalah global, sekarang ada ratusan bahasa yang terancam punah dan beberapa negara di dunia telah menemukan cara revitalisasi bahasa yang baru. Hal ini tidak terlalu mengejutkan jika dilihat dari faktor sosio-historis. Pertama, karena kematian dan kematian bahasa (yaitu berhentinya anak-anak belajar bahasa) terjadi dengan kecepatan yang luar biasa cepat sehingga diperlukan cara-cara baru dalam revitalisasi. Kedua, yang memperparah ancaman terhadap bahasa yang terancam punah adalah mobilitas penduduk di suatu daerah. Strategi baru dalam revitalisasi tentunya diperlukan agar kontak dengan bahasa lain tersebut dapat membantu melestarikan sebuah bahasa asli karena makin tinggi pergerakan manusia yang menghubungkan antarnegara atau dari desa ke kota, makin tinggi pula risiko bahasa itu terancam punah.

Meskipun jelas bahwa banyak bahasa masih eksis dan keragaman bahasa yang sangat besar tetap ada, kepunahan bahasa di setiap generasi akan terjadi. Dalam upaya untuk memerangi ini, organisasi dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Unesco secara aktif berusaha untuk mempromosikan dan melindungi bahasa-bahasa yang terancam punah. Sehubungan dengan itu pula, sejak tahun 1999, Unesco menetapkan Hari Bahasa Ibu setiap tanggal 21 Februari agar menjadi tonggak kesadaran bangsa-bangsa di dunia agar ikut merawat dan menjaga bahasa ibunya untuk generasi penerus di masa depan. Untuk konteks Indonesia, bahasa ibu ini identik dengan bahasa daerah karena penutur yang sehari-hari menggunakan bahasa daerah di rumah biasanya memperoleh bahasa tersebut sejak kecil atau menjadi bahasa pertama yang dikuasainya, meskipun pada konteks geografis, sosial, budaya, dan ekonomi tertentu berbeda.

## **2.2 Dampak Globalisasi pada Situasi Kebahasaan di Indonesia**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat dunia kita menjadi “lebih kecil”, tetapi komunikasi dan kerja sama internasional menjadi lebih luas. Internasionalisasi, globalisasi, dan saling ketergantungan ekologis menjadi ciri abad ke-21. Dengan peningkatan dan perluasan komunikasi manusia yang terus menerus, bahasa yang sifatnya internasional memainkan peran yang semakin penting. Bahasa Inggris, sebagai bahasa

yang mengglobal, memberikan keuntungan dan juga kerugian. Kerugian yang berdampak pada eksistensi sebuah bahasa adalah peran bahasa negara-negara yang lebih kecil dan kurang kuat semakin berkurang dan secara bertahap digantikan oleh bahasa dunia yang dominan, seperti bahasa Inggris. Dengan menganalisis tren ini dan mencatat penyebabnya, kita dapat memahami bagaimana bahasa Inggris menjadi bahasa global yang menguasai bahasa di negara-negara berkembang. Tentu saja, kerugian yang tampak dari proses ini adalah pergeseran budaya yang mengesampingkan budaya asli, termasuk bahasanya.

Hingga saat ini, bahasa yang menduduki peringkat tertinggi sebagai *lingua franca* di dunia memang bahasa Inggris. Seperti yang disampaikan oleh Crystal (2003) dalam bukunya *English as a Global Language*, berkembangnya bahasa Inggris sebagai bahasa global tidak lepas dari adanya ekspansi kekuatan kolonial Inggris di akhir abad ke-19 dan kemudian diikuti dengan munculnya Amerika Serikat di abad ke-20 sebagai negara adidaya di bidang ekonomi. Sehubungan dengan itu pula, kebijakan ekonomi baru dan perdagangan internasional menyebabkan penyebaran bahasa Inggris makin meningkat. Karena bahasa Inggris tersebar luas seiring dengan kemajuan bidang ekonomi yang ditembus juga luas, sekarang kita sulit untuk menemukan negara yang tidak mengajarkan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu atau bahasa kedua atau ketiga. Penutur asli bahasa Inggris tidak lagi berpendapat bahwa bahasa Inggris adalah “bahasa eksklusif”. Saat ini, pengajaran bahasa Inggris kepada bukan penutur asli bahasa Inggris merupakan kebutuhan komersial. Bantuan kepada negara berkembang terkadang berbentuk pengajaran bahasa Inggris. Ekspor bahasa dan budaya membuat status bahasa Inggris menjadi lebih tinggi. Bahkan, akuisisi bahasa Inggris tidak lagi hanya “gaya”, tetapi dianggap cara yang efisien untuk menjadi kaya.

Bahasa Inggris bukan hanya bahasa resmi, semi-resmi, atau umum di lebih dari 70 negara, tetapi digunakan secara luas di 100—130 negara dan wilayah lain di seluruh dunia. Tidak ada bahasa lain yang menyebar begitu cepat dan luas dalam sejarah manusia seperti bahasa Inggris. Bahkan, pengaruh Latin pun pada zaman dulu hanya mencakup area terbatas. Pada tahun 1936, tidak lebih dari 194 juta orang dapat berbahasa Inggris. Angka tersebut meningkat menjadi 700 juta pada tahun 1986. Penduduk yang

dapat berbicara bahasa Inggris dengan lancar meningkat menjadi 1,8—2 miliar pada tahun 1997, dengan 350 juta di Asia saja.

Menurut Kubota dan Ward (2000), penggunaan bahasa Inggris secara global saat ini dapat direpresentasikan dalam tiga lapisan. Pertama, lapisan dalam, yakni bahasa Inggris yang digunakan secara asli; kedua, lapisan luar, yakni bahasa Inggris sebagai bahasa pendidikan; dan ketiga, lapisan yang diperluas, yakni bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang dominan. Lapisan dalam meliputi Australia, Kanada, Irlandia, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Lapisan luar terutama terdiri atas bekas koloni Inggris, seperti Ghana, India, Bengal, Kenya, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Filipina, Singapura, Afrika Selatan, Sri Lanka, Tanzania, Zambia, dan Zimbabwe. Meskipun bahasa Inggris bukan bahasa ibu di negara-negara ini, bahasa ini banyak digunakan dalam komunikasi dan media elektronik, sehingga ada banyak penutur bahasa Inggris yang fasih dan bahasa tersebut memainkan peran penting dalam kehidupan sosial sehari-hari. Lapisan yang diperluas mencakup negara-negara seperti Cina Daratan, Mesir, Indonesia, Israel, Jepang, Korea Selatan, Nepal, Rusia, Arab Saudi, Taiwan, serta negara-negara Karibia dan Amerika Selatan. Di sini, bahasa Inggris bukan bahasa resmi, tetapi diajarkan, disebar, dan digunakan secara luas sebagai bahasa asing atau bahasa kedua.

Dampak penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa global ini, yakni di lapisan yang diperluas, sangat berpengaruh pada dunia pendidikan di negara-negara yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris. Misalnya, di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, bahasa Inggris diajarkan sebagai bahasa asing di sekolah-sekolah. Banyak sekolah, khususnya di kota-kota besar, yang menawarkan kurikulum yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya (*English as a medium of instruction* atau EMI).

Dari waktu ke waktu, bahasa Inggris menjadi bahasa yang banyak digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dianggap penting untuk dikuasai. Selain itu, biasanya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan akan terbuka lebih lebar bagi mereka yang menguasai bahasa ini dengan baik. Dampak dari situasi ini membuat banyak orang yang berpendapat bahwa penguasaan bahasa Inggris jauh lebih penting daripada penguasaan bahasa Indonesia atau bahasa daerah.

Di sisi lain, selain bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun—sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan—menjadi bahasa dominan di Indonesia. Banyak orang tua tidak mewariskan bahasa daerah sebagai bahasa ibu kepada anak-anaknya karena mereka berpendapat bahwa bahasa daerah tidak memiliki fungsi penting untuk masa depan anak-anak mereka. Di ranah keluarga, alih-alih menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi, komunikasi antaranggota keluarga cenderung dilakukan dalam bahasa Indonesia ketimbang bahasa daerah. Selain itu, sebuah kenyataan bahwa sebagian besar keluarga yang tingkat sosial-ekonominya tinggi (biasanya mereka tinggal di kota-kota besar) menganggap bahwa bahasa Inggris jauh lebih penting daripada bahasa Indonesia, sehingga di ranah keluarga pun, mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi sehari-hari. Akibatnya, anak-anak di keluarga tipe ini lebih fasih berbicara dalam bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia, walaupun mereka lahir dan besar di Indonesia (Onishi, 2010; Urip, 2015; Basuningtyas, 2014).

### 2.2.1 Jumlah dan Vitalitas Bahasa Daerah di Indonesia

Situasi kebahasaan yang berada di tengah bahasa resmi dan bahasa internasional, Indonesia dikenal sebagai negara kedua di dunia yang memiliki paling banyak keanekaragaman bahasa lokal. Steinhauer (1994) memberikan estimasi bahwa sepersepuluh dari bahasa-bahasa di dunia dapat dijumpai di bumi Indonesia. Dalam buku *Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia* (2019) yang



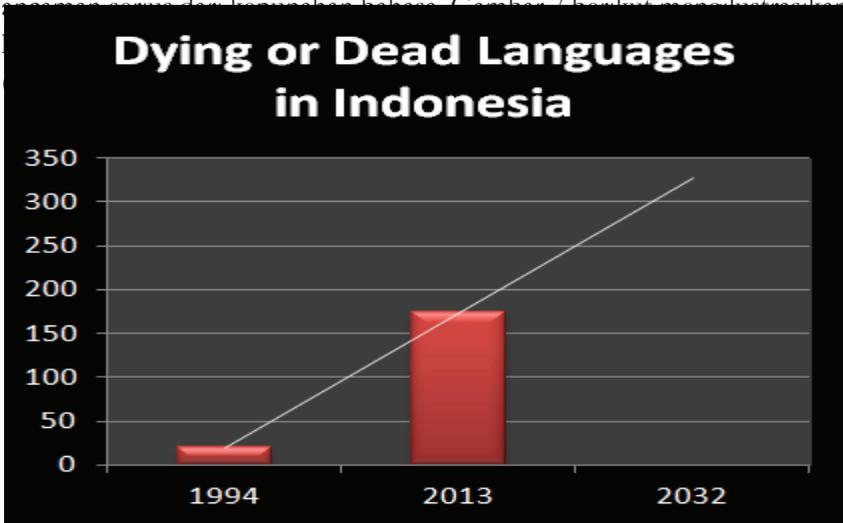
Gambar 6 Peta Bahasa di Indonesia

Berbagai lembaga internasional pun telah mencoba memetakan bahasa di Indonesia beserta vitalitasnya dengan metodologinya masing-masing. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui program United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) dengan proyek Atlas of the World's Languages in Danger (<http://www.unesco.org/languages-atlas>) dan Summer Institute of Linguistics (SIL) Internasional dengan proyek Ethnologue (<https://www.ethnologue.com>) merupakan contoh lembaga dunia yang telah melakukan upaya pemetaan bahasa dan vitalitasnya. Karena perbedaan metodologi itu pula, jumlah bahasa hasil pemetaan lembaga-lembaga tersebut pun berbeda-beda. Misalnya, dengan memasukkan pengakuan penutur secara sosiolinguistik, SIL (Simons dan Fennig, 2017) menyebut jumlah bahasa di Indonesia sebanyak 719 bahasa daerah; 706 di antaranya masih digunakan secara aktif, sedangkan 13 lainnya dianggap sudah punah. Dari 706 bahasa yang masih dituturkan, ada 75 yang berada dalam status hampir punah. Data Ethnologue juga menyebutkan bahwa di Indonesia ada sepuluh bahasa daerah yang penuturnya paling banyak, yaitu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Minang, bahasa Musi, bahasa Bugis, bahasa Banjar, bahasa Aceh, bahasa Bali, dan bahasa Betawi.

Pandangan terkait dengan situasi status kebahasaan di dunia dan Indonesia dikemukakan oleh Koichiro Matsuura, Direktur UNESCO, seperti dikutip Antara News.com pada Selasa, 20 Februari 2009, yang mengatakan bahwa sekitar 2.500 bahasa di dunia, termasuk bahasa-bahasa daerah di Indonesia, terancam punah dan hampir punah. Indonesia, India, AS, Brasil, dan Meksiko termasuk negara dengan keragaman bahasa lokal yang saat ini sedang menghadapi ancaman terbesar kepunahan banyak bahasa. Matsuura menyebutkan bahwa kepunahan bahasa tertentu akan menyebabkan punahnya berbagai bentuk warisan budaya, terutama tradisi dan ekspresi lisan pembicaraannya, yang meliputi puisi dan cerita rakyat, serta peribahasa dan anekdot (“The Codification of Native Papuan Languages”, *Journal of Arts and Humanities (JAH) Warami et al.*, 2020, Vol. 09, No. 10: 40—48).

Ratusan bahasa daerah di Indonesia saat ini banyak yang mengalami penurunan status daya hidupnya. Hal ini dipengaruhi tiga faktor. Pertama, adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota, baik karena faktor ekonomi, bencana alam, pendidikan, ataupun karier. Kedua, faktor politik

yang terfokus ke pusat (atau yang disebut sebagai sentralisasi) menyebabkan wilayah pinggiran atau yang lokasinya jauh dari pusat kota, menjadi tertinggal khususnya terkait dengan informasi. Ketiga, kebijakan pemerintah yang mengharuskan bahwa ranah pendidikan wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar atau media untuk berinteraksi. Dengan adanya tiga faktor tersebut, di masa depan bahasa daerah akan menghadapi



Gambar 7 Tren Kepunahan Bahasa Daerah di Indonesia

Badan Bahasa juga telah melakukan kajian vitalitas bahasa untuk menentukan daya hidup atau vitalitas suatu bahasa daerah. Dari 718 bahasa yang sudah dipetakan, baru 113 bahasa yang dikaji vitalitasnya atau bahasa daerah yang teridentifikasi vitalitas bahasanya baru sekitar 15% dari jumlah bahasa yang sudah terpetakan (berdasarkan kajian vitalitas bahasa pada 2011—2021). Hasilnya, 5 bahasa dikategorikan punah, 8 bahasa kritis, 26 bahasa terancam punah, 29 bahasa mengalami kemunduran, 27 bahasa dalam kondisi rentan (stabil, tetapi terancam punah), dan 18 bahasa berstatus aman.

Tabel 1 Vitalitas Bahasa Daerah di Indonesia

Status	No	Bahasa Daerah	Wilayah
Aman	1	Bahasa Asmat	Papua
	2	Bahasa Walsu	Papua
	3	Bahasa Biak	Papua
	4	Bahasa Bima (Mbojo)	Nusa Tenggara Barat
	5	Bahasa Bugis	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah
	6	Bahasa Dajub (Tokuni)	Papua
	7	Bahasa Korowai Karuwage (Korowage)	Papua
	8	Bahasa Melayu	Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung
	9	Bahasa Madura	Jawa Timur
	10	Bahasa Makassar	Sulawesi Selatan
	11	Bahasa Minangkabau	Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Bengkulu
	12	Bahasa Muna	Sulawesi Tenggara
	13	Bahasa Sasak	Nusa Tenggara Barat
	14	Bahasa Sentani	Papua
	15	Bahasa Serui Laut	Papua
	16	Bahasa Sumbawa	Nusa Tenggara Barat
	17	Bahasa Kombai	Papua
	18	Bahasa Tagalisa	Maluku

Rentan	1	Bahasa Aceh	Sabang (Aceh)
	2	Bahasa Bali dialek Bali Daratan	Bali
	3	Bahasa Jawa dialek Jogja-Solo	D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah
	4	Bahasa Sunda	Jawa Barat
	5	Bahasa Aframa	Papua
	6	Bahasa Bugis (NTB)	Nusa Tenggara Barat
	7	Bahasa Dondo dialek Dampelas	Sulawesi Tengah
	8	Bahasa Gayo	Aceh
	9	Bahasa Klesi	Papua
	10	Bahasa Kerinci	Sumatra
	11	Bahasa Kuri/Nabi	Papua
	12	Bahasa Luhu	Maluku
	13	Bahasa Mandar	Sulawesi
	14	Bahasa Meoswar (Roswar)	Papua
	15	Bahasa Minahasa	Sulawesi
	16	Bahasa Melayu (Betawi)	D.K.I. Jakarta
	17	Bahasa Oirata	Maluku
	18	Bahasa Ormu	Papua
	19	Bahasa Pamona	Sulawesi Tengah
	20	Bahasa Rongga	Nusa Tenggara Timur
	21	Bahasa Senggi (Find)	Papua
	22	Bahasa Somu (Toro)	Papua
	23	Bahasa Wolio	Sulawesi Tengah
	24	Bahasa Lampung	Lampung
	25	Bahasa Modole	Maluku Utara
	26	Bahasa Marori	Papua
	27	Bahasa Seget	Papua Barat

Mengalami Ke- munduran	1	Bahasa Buru	Maluku
	2	Bahasa Gorontalo dialek Suwawai	Gorontalo
	3	Bahasa Hatam	Papua Barat
	4	Bahasa Hitu	Maluku
	5	Bahasa Lemolang	Sulawesi Selatan
	6	Bahasa Melayu di Indragiri Hulu	Riau
	7	Bahasa Ogan dialek Rupit	Sumatra Selatan
	8	Bahasa Rampi	Sulawesi Selatan
	9	Bahasa Saleman	Maluku
	10	Bahasa Tobati	Papua
	11	Bahasa Yalahatan	Maluku
	12	Bahasa Dra	Papua
	13	Bahasa Karas	Papua Barat
	14	Bahasa Kulawi dialek Tomado	Sulawesi Tengah
	15	Bahasa Massenreng- pulu	Sulawesi Selatan
	16	Bahasa Mentawai	Sumatra Barat
	17	Bahasa Morunene (Moronene)	Sulawesi Tengah
	18	Bahasa Ngguntar	Papua
	19	Bahasa Nias	Sumatra Utara
	20	Bahasa Pannei	Sulawesi Barat
	21	Bahasa Pedamaran	Sumatra Selatan
	22	Bahasa Punan Merah	Kalimantan Timur
	23	Bahasa Sahu	Maluku Utara
	24	Bahasa Tehit	Papua Barat
	25	Bahasa Tenggalan	Kalimantan Utara
	26	Bahasa Totoli	Sulawesi Tengah
	27	Bahasa Yamdena dialek Banggoi	Maluku
	28	Bahasa Bekatik	Kalimantan Barat
	29	Bahasa Lematang	Sumatra Selatan

Terancam Puhah	1	Bahasa Awban	Papua
	2	Bahasa Adang	Nusa Tenggara Timur
	3	Bahasa Arguni (Taver)	Papua Barat
	4	Bahasa Bajau Tungkal Satu	Jambi
	5	Bahasa Bku	Papua
	6	Bahasa Dubu	Papua
	7	Bahasa Yamdena dialek Hulung	Maluku
	8	Bahasa Irarutu	Papua
	9	Bahasa Kalabra	Papua Barat
	10	Bahasa Konjo	Sulawesi Selatan
	11	Bahasa Makleu	Papua
	12	Bahasa Mander	Papua
	13	Bahasa Minahasa	Gorontalo
	14	Bahasa Melayu di Bengkalis	Riau
	15	Bahasa Namla	Papua
	16	Bahasa Nedebang	Nusa Tenggara Timur
	17	Bahasa Podena	Papua
	18	Bahasa Ponosakan	Sulawesi Utara
	19	Bahasa Samasuru	Maluku
	20	Bahasa Sangihe Talaud	Sulawesi Utara
	21	Bahasa Sawai	Maluku Utara
	22	Bahasa Tunjung	Kalimantan Timur
	23	Bahasa Enggano	Bengkulu
	24	Bahasa Teon	Maluku
	25	Bahasa Benggaulu	Sulawesi Barat
	26	Bahasa Berangas	Kalimantan Selatan

Kritis	1	Bahasa Mansim Borai	Papua
	2	Bahasa Ibu (Ibo)	Maluku Utara
	3	Bahasa Letti	Maluku
	4	Bahasa Meher	Maluku
	5	Bahasa Rettai	Nusa Tenggara Timur
	6	Bahasa loon	Maluku
	7	Bahasa Saponi	Papua
	8	Bahasa Piru	Nusa Tenggara Timur
Punah	1	Bahasa Hoti	Maluku
	2	Bahasa Kaiely	Maluku
	3	Bahasa Mawes	Papua
	4	Bahasa Piru	Maluku
	5	Bahasa Tandia	Papua Barat

Apabila kita melihat peta kebahasaan di Indonesia—berdasarkan pemetaan yang dibuat Unesco—yang menggambar kepunahan bahasa di Indonesia, sejalan dengan hasil pemetaan vitalitas Badan Bahasa kita dapat menemukan bahwa bahasa-bahasa yang terancam punah tersebut terbanyak terdapat di wilayah Indonesia bagian timur. Bahasa tersebut memiliki jumlah penutur sedikit dan bahkan sudah mulai ditinggalkan oleh penuturnya. Berbeda dengan di pulau Jawa yang hanya memiliki tiga bahasa terbesar (Jawa, Sunda, dan Madura) dengan beragam dialeknya.



Gambar 8 Peta Kepunahan Bahasa dari UNESCO

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengategorikan status vitalitas

bahasa dalam enam tingkatan, yaitu (1) aman, (2) rentan, (3) mengalami kemunduran, (4) terancam punah, (5) kritis, dan (6) punah. Status tersebut diinterpretasikan sesuai dengan kriteria vitalitas bahasa dari Grimes (2000) dengan kisaran indeks 0—1. Angka indeks mengacu pada konsensus para pakar bahasa dan peserta “Konsinyasi Bahasa Terancam Punah” yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa di Ciawi pada tanggal 2—4 Desember 2011, sehingga terbentuklah sebuah pengukuran indeks vitalitas bahasa seperti terlihat pada Tabel 2 Kriteria Vitalitas Bahasa berikut.

Tujuan dari penentuan status vitalitas bahasa itu adalah untuk mengetahui 1) karakteristik penutur suatu bahasa; 2) sikap bahasa penutur bahasa, termasuk sikap bahasa pihak pemerintahnya; 3) distribusi frekuensi dan persentase respons penutur terhadap pernyataan setiap indikator vitalitas bahasa dan hubungan semua indikator tersebut dengan karakteristik penutur; serta 4) menetapkan status vitalitas suatu bahasa berdasarkan hubungan semua indikator dengan karakteristik penutur dan implikasi tindak lanjut penanganan terhadap bahasa tersebut (Harimansyah, 2017: 14 dan 24—25).

Tabel 2 Kriteria Vitalitas Bahasa

No.	Kriteria Vitalitas Bahasa	Angka dan Garis Indeks Diagram Jaring Laba-Laba	
		Angka Indeks	Garis Indeks
1	<b>Kritis</b>	0,0—0,20	1—2
2	<b>Terancam punah (<i>endangered</i>)</b>	0,21—0,40	2—3
3	<b>Mengalami kemunduran (<i>eroding</i>)</b>	0,41—0,60	3—4
4	<b>Rentan</b>	0,61—0,80	4—5
5	<b>Aman (<i>safe</i>)</b>	0,81—1	5—6

### 2.2.2 Situasi triglosik

Selain situasi keberagaman bahasa, jumlah bahasa yang banyak, persebaran bahasa di suatu wilayah, dan status daya hidup bahasa, situasi kebahasaan di Indonesia juga amat kompleks dari aspek sosiolinguistik. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan dwibahasawan (*bilingual*) dan sebagian lainnya adalah aneka bahasawan (*multilingual*).

Situasi diglosia di Indonesia tidak seperti digambarkan dalam teori sosiolinguistik klasik yang menyatakan bahwa diglosia itu mengacu kepada kondisi dua ragam bahasa yang hidup berdampingan dalam satu bahasa hidup dan setiap ragam itu mempunyai peran atau fungsi tertentu secara selaras (lihat Ferguson, 1959). Situasinya lebih tepat seperti yang digambarkan oleh Fishman (1967) yang mengacu kepada pendistribusian lebih dari satu bahasa atau bahasa ragam yang mempunyai tugas-tugas komunikasi berbeda dalam suatu masyarakat. Fishman memang menekankan pada perbedaan linguistik, bagaimanapun bentuk dan wujudnya, mulai dari perbedaan gaya dalam satu bahasa sampai kepada penggunaan dua bahasa yang sangat berbeda. Menurut Fishman, yang penting dalam hal ini adalah masing-masing ragam itu mempunyai fungsi yang berbeda dan dalam ranah yang berbeda pula. Di kota-kota besar di Indonesia lazim ditemui di suatu daerah didiami beberapa suku bangsa dengan bahasa daerah masing-masing di samping bahasa Indonesia. Dalam situasi seperti itu, fungsi bahasa daerah berbeda dengan bahasa Indonesia dan setiap bahasa daerah pun mempunyai ranah yang berbeda pula. Bahasa daerah membangun suasana kekeluargaan, keakraban, kesantiaian, dan dipakai dalam ranah kerumahtanggaan atau kekariban dan ketetanggaan sesuku, sedangkan bahasa Indonesia membangun suasana formal, resmi, kenasionalan, dan dipakai misalnya dalam ranah persekolahan (sebagai bahasa pengantar), ranah kerja (bahasa resmi dalam rapat), dan dalam ranah keagamaan (khotbah).

Dalam masyarakat Indonesia juga akan dijumpai tingkat-tingkat bahasa dalam beberapa bahasa daerah, seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, atau Madura. Dalam masyarakat Sunda dikenal *undak usuk basa*, di dalamnya terdapat aturan tata bahasa yang mengatur tingkatan ragam bahasa rendah dan ragam bahasa tinggi seperti *basa cobag* (ragam kasar), *basa loma* (ragam untuk sesama atau yang sudah akrab), *basa sedeng* (ragam sedang atau tengah), *basa lemes* (ragam halus). Di Jawa terdapat bahasa *ngoko* (tingkat paling

rendah), *krama* (tengah), *krama inggil* (tingkat tinggi). Keduanya mempunyai ukuran baku masing-masing dan diakui oleh masyarakat pemakainya.

Di dalam percakapan, ragam-ragam tersebut menduduki fungsi sosial tertentu. Dalam hal ini, pemakaian suatu ragam dalam bahasa-bahasa daerah itu bukan didasarkan atas topik pembicaraan, melainkan oleh siapa (golongan atau kelas) dan untuk siapa. Namun, sekarang fungsi sosial tersebut sulit ditemui dalam keseharian. Dahulu, dalam bahasa Jawa dan Sunda, undak usuk ini benar-benar digunakan sesuai dengan tingkatan sosial masyarakat dan situasi komunikasi. Dalam bahasa Jawa misalnya, *krama inggil* dipakai dalam karya sastra, seperti dalam tembang, atau untuk percakapan ke orang tua atau orang yang sangat dihormati, sedangkan untuk percakapan sehari-hari menggunakan bahasa *ngoko*. Begitu juga dalam bahasa Sunda, ketika seorang anak berbicara dengan seorang guru tidak bisa menggunakan bahasa *loma*, tetapi harus menggunakan bahasa *lemes*. Dalam masyarakat Bali yang terdapat kasta-kasta dalam masyarakatnya, ada suatu aturan tersendiri dalam pemakaian ragam bahasa ini. Misalnya, kasta rendah harus menggunakan bahasa rendah untuk sesamanya dan bahasa tinggi untuk kasta yang lebih tinggi.

Pada umumnya, masyarakat perkotaan di Indonesia menguasai dua bahasa atau lebih. Mereka menggunakan tiap bahasa itu dengan yang sama baiknya. Sebagai contoh, di wilayah Sumatra Barat, misalnya di kota Padang, bahasa Minangkabau dan bahasa Indonesia memiliki peran dan kedudukannya masing-masing sesuai dengan fungsinya. Dalam situasi formal pada ranah pemerintahan, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, sementara dalam situasi santai dan tidak formal, misalnya di ruang-ruang umum terbuka seperti pasar dan pertemanan, umumnya digunakan bahasa Minangkabau sebagai media komunikasi antara penutur dan mitra tutur. Fenomena demikian dalam linguistik disebut sebagai masyarakat dwibahasawan dengan diglosia.

Di DKI Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan, situasi diglosiknya berbeda dari situasi diglosik di daerah. Pada umumnya, kaum muda yang tinggal di Jakarta menggunakan dua varian bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia ragam formal dan bahasa Indonesia ragam kolokial (Sneddon, 2003). Ragam informal atau kolokial yang digunakan di ibukota dianggap lebih “bergengsi” atau “berkelas” dan karenanya banyak ditiru oleh anak-anak muda dari luar Kota Jakarta. Studi Sneddon (2003) serta

Turner dan Wong (2010) menunjukkan contoh-contoh penggunaan bahasa Indonesia dan kolokial Jakarta bagi warga Jakarta untuk fungsi dan kepentingan yang berbeda. Bahasa Indonesia sebagai varietas tinggi dan kolokial Jakarta sebagai varietas rendah. Dua studi ini juga menunjukkan peningkatan penggunaan kolokial Jakarta sebagai alat komunikasi—tidak hanya lisan-akrab-kolegial antarwarga Jakarta, tetapi juga telah menjadi repertoar bagi penyiar radio swasta di Jakarta, dan juga masuk ke naskah film, termasuk telah merajai dialog-dialog dalam sinetron kejar tayang pada sejumlah stasiun televisi swasta-nasional. Tak sampai di sini, kolokial Jakarta pun telah menjadi repertoar baru bagi perilaku berbahasa dalam komunikasi dunia maya, *nge-twit dan facebook-an*, bagi kawula muda dan kelas menengah Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Situasi diglosik untuk Jakarta berdasarkan temuan Sneddon serta Turner dan Wong dapat digambarkan sebagai berikut (Ibrahim dan Mayani, 2018).

Dalam dua dekade terakhir, penetrasi kolokial Jakarta bahkan telah merambah ke sejumlah kota penting di luar Jakarta, seperti Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Medan, Padang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Manado, hingga beberapa kota di Kalimantan melalui jejaring radio swasta di kota-kota ini. Amatan dan simpulan Sneddon serta Turner dan Wong ini tentu saja hanya relevan bagi masyarakat tutur Jakarta atau hanya bisa relevan dan sah bagi kawasan lain di Indonesia yang masyarakatnya monolingual bahasa etnik, seperti di Sunda, Jawa, beberapa kota di Sumatra, dan beberapa kota di Kalimantan. Pada kota atau kawasan monolingual seperti ini situasinya memang benar-benar diglosik: bahasa etnik untuk komunikasi akrab, santai, dalam keluarga, dan di ranah rumah; sedangkan bahasa Indonesia digunakan di dunia pendidikan, aktivitas perkantoran, dan perdagangan (Ibrahim dan Mayani, 2018; Ibrahim, 2013 dan 2015).

Situasi kebahasaan di Indonesia juga dapat bersifat triglosik. Di kota atau kawasan multilingual, seperti beberapa kawasan di Kalimantan dan sejumlah provinsi di timur Indonesia, yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, bahasa Melayu setempat atau istilah Ibrahim (2013 dan 2015) sebagai Melayu Tempatan dipakai sebagai *lingua-franca* atau “jembatan sosial” bagi komunikasi lintas-etnik. Pada kawasan multilingual tersebut, bahasa Indonesia digunakan di dunia pendidikan dan pemerintahan, bahasa Melayu Tempatan sebagai sarana komunikasi lintas-

etnik, sedangkan bahasa etnik digunakan untuk komunikasi di kampung, dalam keluarga, dan dalam aktivitas adat atau budaya tempatan (Ibrahim dan Mayani, 2018).

Contoh lain, di Kalimantan Tengah, misalnya, orang-orang Dayak merupakan masyarakat aneka bahasawan. Sebagian besar orang Dayak Ngaju menggunakan bahasa Banjar sebagai bahasa sehari-hari dalam interaksi tidak resmi, seperti di ranah jual beli, sementara pada lingkup keluarga mereka menggunakan bahasa Dayak Ngaju. Namun, di ranah pemerintahan atau ranah lainnya yang bersifat resmi, penutur Dayak Ngaju menggunakan bahasa Indonesia. Contoh lain, orang Papua yang tinggal di Manokwari biasa menggunakan bahasa Indonesia dalam ranah formal. Bahasa Indonesia dengan dialek Papua mereka gunakan sebagai bahasa sehari-hari, sedangkan bahasa etnik (misalnya bahasa Dani, bahasa Amber, dll.) digunakan bila mereka berinteraksi dengan orang yang berbicara dalam bahasa daerah yang sama.

## 2.3 Pelindungan Bahasa Daerah

Pada awal pertengahan abad XX, upaya pelindungan bahasa untuk mencegah kepunahan bahasa menjadi fokus studi yang penting di kalangan pakar linguistik dan menjadi aksi di berbagai negara, bahkan sudah menjadi renjana dalam Rencana Aksi PBB melalui Unesco. Upaya revitalisasi ini pun berkembang dengan pesat dan menyebar luas di berbagai negara.

Dari sisi akademis, studi tentang revitalisasi bahasa menjadi subbidang linguistik yang relatif baru yang berfokus pada perumusan dan evaluasi strategi dan tindakan yang bertujuan untuk membalikkan proses erosi bahasa dan membawa bahasa yang terancam punah kembali digunakan dalam komunitas tutur mereka. Studi revitalisasi ini tentunya terkait dengan banyak bahasa akan menghadapi kepunahan sebagian atau seluruhnya dalam beberapa dekade mendatang. Menanggapi situasi yang meresahkan itu, linguistik secara bertahap bergeser dari memperlakukan bahasa hanya sebagai objek studi untuk berpartisipasi dalam proses revitalisasi. Kegiatan terkait dapat mencakup evaluasi situasi bahasa yang terancam, mempelajari penyebab kepunahan atau kematiannya, aktivisme bahasa, dokumentasi bahasa dan, yang paling penting, kolaborasi langsung dengan penutur asli dalam upaya revitalisasi mereka. Revitalisasi bahasa, dengan demikian,

membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai bidang dan disiplin ilmu seperti pendidikan, penguasaan bahasa, pedagogi, metodologi pengajaran bahasa, dokumentasi bahasa, dan linguistik kognitif.

Dari sisi ekonomis, upaya revitalisasi bahasa memang usaha yang hasilnya tidak “nyata” secara materi, tetapi gerakan ini merupakan perjuangan untuk memberikan sumbangan signifikan dalam rangka menjaga kekayaan batin bangsa (sesuatu yang menyangkut jiwa [perasaan hati, dsb]; semangat; hakikat). Kepunahan sebuah bahasa bukan sekadar kepunahan kosakata atau tata bahasa, tetapi kehilangan warisan budaya bangsa yang sangat berharga. Bahkan, Unesco pada peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional tahun 2010 mengingatkan kembali bahwa ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga—sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah.

Tujuan utama revitalisasi adalah untuk mentransmisikan bahasa kepada mereka yang tidak mengetahuinya dan untuk mendorong baik pengguna bahasa maupun pelajar untuk menggunakannya dalam serangkaian situasi yang beragam. Upaya-upaya yang diarahkan untuk menggunakan kembali bahasa-bahasa yang terancam atau “tidur” itu berbeda dalam bentuk dan intensitasnya. Mereka mungkin termasuk instruksi dalam kosa kata dasar bahasa, koleksi publikasi linguistik, catatan lapangan dan corpora linguistik untuk penggunaan pedagogis, penciptaan sistem penulisan, pengembangan kamus dan buku teks berdasarkan kebutuhan pendidikan masyarakat pidato, persiapan audio dan rekaman video, pengajaran bahasa formal, organisasi kamp bahasa dan pendirian sekolah imersi.

Ada tiga istilah selain revitalisasi bahasa yang menggambarkan upaya untuk mencegah proses kepunahan bahasa. Pertama, *reklamasi bahasa* yang mengacu pada upaya yang dilakukan oleh masyarakat tutur untuk memulihkan bahasa yang telah hilang karena faktor eksternal. Kedua, kebangkitan bahasa (*language revival*) yang mengacu pada situasi bahasa yang tidak lagi memiliki penutur hidup, tetapi telah direkonstruksi dan digunakan kembali. Ketiga, *pemeliharaan bahasa* (*Language maintenance*) yang mengacu pada kegiatan yang ditujukan untuk mendukung bahasa yang masih digunakan di banyak ranah sosial, meskipun bersaing dengan bahasa dominan atau mayoritas. Penelitian dalam pemeliharaan bahasa sangat erat kaitannya dengan konsep pergeseran bahasa karena sering dilakukan melalui

identifikasi bidang fungsional untuk bahasa yang tidak lagi digunakan atau secara bertahap digantikan oleh yang lain. Setakat ini, ketiga istilah ini terangkum dalam makna umum revitalisasi.

Ada empat model secara umum yang sering dipraktikkan di berbagai negara (Hinton, 2018; Thomason, 2015). Keempat model revitalisasi bahasa itu adalah sebagai berikut.

1. Revitalisasi bahasa berbasis sekolah.

Model revitalisasi ini mengarah pada peningkatan penguasaan bahasa dan sastra daerah melalui ranah pendidikan, baik sebagai muatan lokal maupun ekstrakurikuler. Peserta kegiatan revitalisasi model ini adalah siswa sekolah.

Program berbasis sekolah termasuk contoh kasus revitalisasi bahasa yang paling berhasil. Keberhasilan itu karena para siswa relatif besar diwajibkan belajar bahasa daerah/lokal secara rutin dan terjadwal.

2. Pembelajaran bahasa berbasis komunitas.

Model revitalisasi ini menekankan pada peningkatan penguasaan bahasa dan sastra daerah melalui komunitas, seperti kelompok kesenian atau kelompok pecinta bahasa dan sastra daerah. Peserta kegiatan revitalisasi model ini adalah anggota komunitas.

3. Revitalisasi bahasa berbasis keluarga.

Model revitalisasi ini menekankan pada peningkatan penguasaan masyarakat terhadap bahasa dan sastra daerah melalui lingkungan rumah tangga. Aksi dipusatkan pada lingkup desa, kelurahan, atau kecamatan. Peserta kegiatan revitalisasi model ini adalah perseorangan ataupun kelompok sebagai kader bahasa dan sastra daerah dalam ranah keluarga. Revitalisasi dengan model berbasis keluarga ini populer juga dengan istilah “sarang bahasa” (*language nest*, diambil dari bahasa dari bahasa Māori *kōhanga reo*). Model ini menggunakan pendekatan berbasis imersi untuk revitalisasi bahasa dalam pendidikan anak usia dini. Sarang bahasa berasal dari Selandia Baru pada 1980-an, sebagai bagian dari program bahasa Māori di negara itu. Dalam sarang bahasa, penutur bahasa yang lebih tua mengambil bagian dalam pendidikan anak-anak melalui transfer bahasa antargenerasi.

4. Revitalisasi bahasa pada orang dewasa

Revitalisasi bahasa ini berfokus pada pembelajaran bahasa orang dewasa

untuk mempelajari bahasa lokal atau untuk meningkatkan kemahiran bahasa mereka. Hasil revitalisasi model ini ditujukan agar penutur dewasa dapat memperkenalkan atau memelihara bahasa mereka di rumahnya sebagai bahasa fungsional dalam kehidupan sosial dan ekonominya. Penutur dewasa juga dapat mendukung pembelajaran anak-anak mereka, baik di rumah maupun di sekolah.

Kesamaan dari keempat model tersebut terletak pada upaya-upaya yang tidak hanya memperhitungkan penutur termuda dari komunitas yang terputus transmisi bahasa antargenerasinya, tetapi juga melibatkan "penutur baru", seperti guru, siswa, aktivis, peneliti, dan pemangku kepentingan yang mewakili masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, program revitalisasi bahasa yang baik sangat bergantung dari sejauh mana kita dapat melihat dan mempertimbangkan berbagai faktor yang menjadi pemicu seorang individu dalam sebuah komunitas untuk dapat memilih bahasa apa yang akan mereka gunakan.

Dengan demikian, dibutuhkan pemahaman yang menyeluruh terhadap situasi kebinekaan yang ada dalam suatu masyarakat bahasa untuk melihat bagaimana sikap bahasa penutur dan bagaimana posisi bahasa tersebut di kalangan komunitasnya sendiri. Selain itu, sebuah program revitalisasi dari satu bahasa di satu daerah belum tentu dapat diaplikasikan pula untuk bahasa lain di daerah yang lain. Hal tersebut menjadi sulit karena dalam merancang sebuah program revitalisasi perlu dilakukan berbagai pendekatan untuk mengetahui kondisi sosial, budaya, dan sikap bahasa dari penutur bahasa tersebut.

Dalam menyusun sebuah rekomendasi untuk kegiatan revitalisasi, diperlukan perhatian pada sejumlah aspek mengenai luaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) serta ukuran kinerja bagi setiap aspek tersebut. Dalam hal penyusunan luaran (*output*), dapat diperiksa capaian jangka pendek, seperti berikut ini.

- 1) Ketersediaan data dan informasi mengenai bahasa dan sastra daerah (termasuk sastra lisan dan sastra tulis) yang masih difungsikan.
- 2) Ketersediaan data dan informasi mengenai pelaku/pegiat bahasa dan sastra daerah dalam kegiatan tradisional.
- 3) Ketersediaan data dan informasi mengenai sarana dan prasarana bidang bahasa dan sastra daerah.

- 4) Ketersediaan data dan dokumentasi bahasa, seperti kamus, tata bahasa, daftar kata, serta kajian-kajian tentang bahasa tersebut, serta ketersediaan data dan dokumentasi sastra daerah, seperti publikasi ataupun rekaman.
- 5) Ketersediaan data dan informasi mengenai bahasa dan sastra daerah yang sudah tidak lagi difungsikan.
- 6) Ketersediaan data dan informasi tradisional bahasa dan sastra daerah yang sudah berubah fungsinya.
- 7) Ketersediaan data dan informasi mengenai bahasa dan sastra daerah yang dijadikan bahan ajar di sekolah-sekolah.
- 8) Ketersediaan data dan informasi ekosistem bahasa dan sastra daerah yang masih ada.

Penyusunan hasil (*outcome*) diupayakan dapat dilihat dalam jangka menengah, yaitu sebagai berikut.

- 1) Ketersediaan data dan informasi mengenai dukungan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah;
- 2) ketersediaan data dan informasi mengenai dukungan dari komunitas bahasa itu sendiri dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah;
- 3) ketersediaan data dan informasi mengenai dukungan sektor swasta dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah;
- 4) ketersediaan data dan informasi mengenai dukungan media dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah;
- 5) ketersediaan data dan informasi mengenai dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah; serta
- 6) ketersediaan data dan informasi mengenai dukungan sektor pendidikan dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah.

Oleh karena itu, diharapkan nantinya hal-hal tersebut dapat membantu terbentuknya ekosistem bahasa sehingga memiliki dampak sebagai berikut.

- 1) Menghidupkan kembali ekosistem bahasa dan sastra daerah agar mampu menumbuhkan motivasi para pelakunya untuk lebih kreatif;
- 2) menghidupkan kembali ekosistem bahasa dan sastra daerah mampu menambah ranah penggunaan bahasa daerah dan juga menambah daya kreasi atas sastra daerah;
- 3) menghidupkan kembali ekosistem bahasa dan sastra daerah ini mampu mendorong partisipasi aktif dari pemangku kepentingan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas pendidikan, komunitas, serta individu pegiat dan penutur;
- 4) menghidupkan kembali ekosistem bahasa dan sastra daerah mampu melahirkan generasi-generasi penerus untuk mewarisi budaya (seni) tradisional; dan
- 5) menghidupkan kembali ekosistem bahasa dan sastra daerah untuk menambah *income* pelakunya.

## 2.4 Praktik Pelindungan Bahasa

Kegiatan pelindungan bahasa daerah melalui revitalisasi bahasa merupakan upaya yang seharusnya dilakukan berkelanjutan terus oleh lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, atau organisasi masyarakat. Beberapa kegiatan bersifat temporer, tetapi ada juga yang berkelanjutan hingga puluhan tahun. Oleh karena itu. Pemodelan dan contoh-contoh praktik baik revitalisasi sangat diperlukan. Berikut ini beberapa praktik pelindungan bahasa daerah sebagai implementasi revitalisasi bahasa daerah yang bisa dijadikan contoh.

### 1. Hadiah Sastra Rancagé dan Penghargaan Lainnya

Hadiah Sastra Rancagé diberikan setiap tahun mulai tahun 1989 sampai sekarang tanpa ada tahun yang terlewat. Pada tahun pertama, hadiah yang diprakarsai Yayasan Kebudayaan Rancagé ini diberikan hanya kepada pengarang yang tahun sebelumnya menerbitkan buku karya sastra dalam bahasa daerah yang paling bermutu. Namun, sejak tahun kedua (1990), hadiah diberikan juga kepada orang atau lembaga yang besar jasanya dalam

mengembangkan dan mempertahankan kehidupan bahasa dan sastra dalam bahasa ibunya. Dengan demikian, setiap tahun diberikan dua Hadiah Sastra Rancagé, satu untuk karya (buku sastra berbahasa daerah) dan satu lagi untuk jasa. Sampai tahun 2022, lebih dari 100 buku sastra dari berbagai bahasa daerah yang telah mendapatkan hadiah ini. Selain Hadiah Sastra Rancagé, balai dan kantor bahasa di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali juga kerap memberikan penghargaan kepada para penulis bahasa daerah. Contoh lainnya adalah Penghargaan Prasidatama dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah yang sejak tahun 2021 memberikan penghargaan kepada karya sastra berbahasa Jawa, selain penghargaan untuk karya-karya sastra berbahasa Indonesia. Untuk memperluas cakupan pembaca dan memperkenalkan khazanah budaya Jawa dalam sastra, karya-karya sastra berbahasa Jawa peraih penghargaan itu diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Demikian juga peraih penghargaan untuk karya-karya sastra berbahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa.

## 2. Penerjemahan Buku Berbahasa Daerah

Beberapa buku berbahasa daerah telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini merupakan upaya untuk menyebarkan kandungan pengetahuan yang ditulis dalam bahasa daerah kepada kalangan yang tidak menguasai bahasa tersebut. Program ini pernah dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) pada tahun 2016 dan 2017, kemudian dilanjutkan tahun 2021 oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

## 3. Perlombaan Berbahasa Daerah

Di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali, setiap tahun selalu ada kegiatan perlombaan atau festival berbahasa daerah. Materi yang dilombakan mencakup penulisan karya sastra berbahasa daerah, membaca sajak, tembang, dan sebagainya. Perlombaan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum dan anak-anak sekolah. Selain itu, ada juga bentuk perlombaan berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Di Jawa Barat, perlombaan berjenjang ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan kota atau kabupaten dan para juaranya dipertandingkan lagi di tingkat provinsi. Namun, sejak tahun 2017, Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Barat tidak lagi meneruskan kegiatan ini. Barulah pada tahun 2021 dilanjutkan kembali oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI). Bukan hanya di Jawa Barat, pada tahun 2021 FTBI juga diselenggarakan di Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Tengah.

#### 4. Media Cetak dan Daring

Bahan cetakan masih diperlukan hingga saat ini sebagai penopang pengembangan bahasa daerah. Menurut data Yayasan Kebudayaan Rancagé yang rutin mengumpulkan data penerbitan buku berbahasa daerah, di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali wilayah Model A masih terbit sekitar 100 judul buku bahasa daerah setiap tahunnya. Namun, penerbitan sastra dan bahasa daerah masih perlu ditingkatkan karena belum proporsional dibandingkan dengan jumlah penutur bahasa tersebut. Selain itu, di tengah maraknya media sosial dan digital, ternyata masih ada beberapa media masa konvensional yang masih terbit. Dalam bahasa Sunda ada Majalah *Manglé*, Koran *Galura*, Majalah *Sunda Midang*, dan sebagainya. Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat juga menerbitkan Majalah *Pasundan* yang berhenti terbit tahun 2019. Sementara itu, dalam bahasa Jawa ada Majalah *Panjebar Semangat*, Majalah *Jaya Baya*, dan *Swaratama* terbitan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Upaya menyebarkan bahasa daerah juga dilakukan melalui media digital. Cukup banyak laman web dan aplikasi gawai telepon cerdas yang secara khusus menyajikan konten berbahasa daerah.

#### 5. Kongres, Seminar, dan Lokakarya Bahasa Daerah

Pada dasarnya, hampir setiap daerah di Indonesia memiliki permasalahan yang sama, yaitu merasakan kemunduran penggunaan bahasa ibu akibat tidak atau kurang dipakai oleh penuturnya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang pendidikan. Bagi para pecinta bahasa daerah dari Jawa, Sunda, Bali, dan lain-lain, penghapusan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di setiap jenjang sekolah menimbulkan semacam kegetiran akan nasib dan masa depan bahasa daerahnya sendiri. Padahal, sebenarnya bahasa-bahasa daerah itu harus dipelihara dan dikembangkan karena ia merupakan “pemer kaya bangsa Indonesia”.

Berbagai masalah bahasa daerah di wilayah Model A sering diperbincangkan dalam berbagai pertemuan kebahasaan seperti kongres,

seminar, lokakarya, dan Diskusi Kelompok Terpumpun. Para penutur bahasa Sunda mengadakan Kongres Bahasa Sunda secara berkala setiap lima tahun. Demikian pula penutur bahasa Jawa dan Bali, mereka juga mengadakan kongres bahasa daerah. Pertemuan-pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi untuk mengembangkan bahasa daerah di masa mendatang.

#### 6. Komunitas Menulis dan Literasi Bahasa Daerah

Keberadaan berbagai komunitas yang memiliki visi memajukan bahasa daerah memiliki peran yang penting dalam memajukan bahasa daerah. Meskipun dengan jumlah anggota terbatas, komunitas-komunitas ini secara tekun mengembangkan berbagai kreasi sastra dan bahasa, misalnya melalui pelatihan menulis, kelompok membaca, dan sebagainya.

#### 7. Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bersama Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia sejak 2017 selalu memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional. Peringatan ini diisi dengan berbagai kegiatan, yakni seminar dan berbagai lomba kebahasaan yang tentunya dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan kembali bahasa dan sastra daerah. Kegiatan yang telah rutin dilaksanakan antara lain berbagai perlombaan seperti membaca sajak, menulis cerita pendek, dan berpidato. Selain itu, ada juga diskusi atau seminar bahasa ibu.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Merdeka Belajar Episode Ke-17 yang bertajuk Revitalisasi Bahasa Daerah pada Selasa, 22 Februari 2022. Peluncuran kebijakan ini bertepatan dengan momen Hari Bahasa Ibu Internasional pada 21 Februari 2022. Revitalisasi yang diusung Kemendikbudristek ini merupakan pendekatan baru untuk revitalisasi bahasa daerah di Indonesia.

Kemendikbudristek dalam program revitalisasi ini menysasar pada komunitas tutur dalam pelaksanaan model pembelajaran dan kurikulum di setiap daerah yang melibatkan keluarga, guru, maestro, dan pegiat pelindung bahasa dan sastra daerah. Sebagai contoh, untuk revitalisasi bahasa berbasis sekolah, peserta didik akan diberi kebebasan dalam memilih bahasa daerah yang ingin dipelajari sesuai minat masing-masing dan ada media bagi mereka

untuk berekspresi dengan bahasanya. Program revitalisasi ini tentunya dikembangkan secara kreatif, inovatif, menyenangkan, dan berpusat kepada penutur bahasa itu sendiri.

Prinsip dasar dalam revitalisasi bahasa daerah dengan pendekatan baru ini adalah sebagai berikut.

1. Dinamis, yakni berorientasi pada pengembangan bahasa daerah dan keperluan komunikasi, bukan sekedar memproteksi bahasa.
2. Adaptif dengan situasi lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun masyarakat tuturnya.
3. Regenerasi dengan fokus pada penutur muda di tingkat sekolah dasar dan menengah.
4. Merdeka berkreasi dalam penggunaan bahasanya.

Seperti dinyatakan pada prinsip pertama, revitalisasi dengan pendekatan ini menekankan pada perlindungan melalui pengembangan bahasa itu sendiri, tidak sekedar memproteksi bahasa dari kepunahan. Bahasa itu harus dikembangkan dan membuka ranah-ranah baru dalam praktik komunikasinya.

Terdapat tiga model revitalisasi yang masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri dalam praktiknya. Namun, ketiga model tersebut tetap mengacu pada empat prinsip dasar revitalisasi. Pada pedoman ini, pembahasan difokuskan pada revitalisasi model A. Revitalisasi bahasa model A diperuntukkan bagi bahasa daerah dengan karakteristik (1) daya hidup bahasanya aman atau rentan, (2) merupakan bahasa dominan di dalam masyarakat tuturnya, dan (3) mempunyai jumlah penutur yang besar.

Untuk model A, revitalisasi dilakukan melalui pendekatan (1) pewarisan atau transmisi secara terstruktur dengan pembelajaran di sekolah (berbasis sekolah) atau pesantren dan (2) pembelajaran dilakukan secara integratif, kontekstual, dan adaptif, baik melalui muatan lokal maupun ekstrakurikuler.



## BAB III

# PENDEKATAN BARU REVITALISASI BAHASA DAERAH MODEL A

### 3.1 Konsep Dasar Revitalisasi Bahasa Model A

Revitalisasi bahasa pada model A dilaksanakan dengan berbasis sekolah, salah satunya melalui muatan lokal. Mata pelajaran muatan lokal bahasa daerah memiliki kedudukan penting untuk memperkenalkan kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai landasan etnopedagogis. Pembelajaran bahasa daerah dapat dianggap sebagai gerbang untuk menanamkan dan mempertajam nilai-nilai karakter bangsa, melatih kepekaan berpikir, olah rasa, olah karsa, serta sarana menyalurkan gagasan dan imajinasi dalam berbagai kreativitas. Selain itu, diharapkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta pengalaman apresiasi dan ekspresi bahasa dan sastra, di samping meningkatkan kecerdasan logika dan retorika.

Gagasan di atas selaras dengan program “penguatan karakter bangsa” yang termaktub pada salah satu butir Nawacita Presiden Joko Widodo melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Komitmen Presiden tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengutamakan dan membudayakan pendidikan karakter di dalam dunia pendidikan. Atas dasar itulah, mata pelajaran mulok yang sarat nilai pendidikan karakter bangsa menjadi kian penting kedudukannya.

Revitalisasi model A ini mengarah pada peningkatan penguasaan bahasa daerah melalui ranah pendidikan, baik sebagai muatan lokal maupun ekstrakurikuler. Peserta kegiatan revitalisasi model ini adalah siswa sekolah. Bentuknya dapat berupa perlombaan bahasa, sastra, dan aksara untuk Siswa SD dan SMP sebagai ajang evaluasi bagi para siswa yang telah mendapat pengajaran bahasa daerah di sekolahnya masing-masing. Harapannya, siswa SD dan SMP sebagai generasi muda dapat mencintai budaya sendiri dan dapat menggunakan bahasa ibunya dengan baik.

## 3.2 Kurikulum dan Materi Revitalisasi Bahasa Daerah Model A

Materi yang dilombakan dalam Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat SD dan SMP di tingkat provinsi merupakan bagian dari pelajaran bahasa daerah yang diterima siswa di sekolah. Lomba-lomba yang akan disajikan dalam Festival Tunas Bahasa Ibu merupakan hasil musyawarah di masing-masing wilayah. Penyelenggara festival mendapat keleluasaan untuk menambah atau mengurangi jumlah materi. Adapun materi-materi yang dapat dilombakan adalah sebagai berikut.

### 1. Bercerita atau Mendongeng

Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, terjadi di luar nalar manusia yang penuh fantasi dan khayalan (fiksi). Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal (Nurgiyantoro, 2005:198). Pendapat lain mengenai dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh (KBBI, 2007:274). Senada dengan Lezin dalam bukunya *Bibliocollège*, Charles Perrault yang mengatakan bahwa “*Le conte est un court récit d’aventures imaginaires mettant en scène des situations et des personnages surnaturels*”. Dongeng adalah cerita pendek tentang petualangan khayal dengan situasi dan tokoh-tokoh yang luar biasa dan gaib. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi yang berisi tentang petualangan yang penuh imajinasi dan terkadang tidak masuk akal dengan menampilkan situasi dan para tokoh yang luar biasa.

Dongeng diceritakan terutama untuk hiburan walaupun banyak juga melukiskan tentang kebenaran, berisikan pelajaran (moral), bahkan sindiran. Pengisahan dongeng mengandung harapan-harapan, keinginan-keinginan, dan nasihat baik yang tersirat maupun tersurat. Dongeng adalah media yang sangat efektif untuk menanamkan berbagai nilai dan etika terhadap anak, termasuk menimbulkan rasa empati dan simpati anak. Nilai-nilai yang bisa dipetik dari dongeng adalah nilai kejujuran, kerendahan hati, kesetiakawanan, kerja keras, dan sebagainya. Bagi murid SD dan SMP ternyata dongeng masih tetap dinantikan. Cerita atau dongeng adalah salah satu media komunikasi guna menyampaikan pesan moral kepada anak.

Selain itu, metode-metode pembelajaran yang menggunakan teknologi digital menarik untuk para peserta didik.

Dongeng tidak hanya terdiri atas satu jenis, melainkan terdapat beberapa jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng yang umumnya dikenal masyarakat di antaranya adalah mite, legenda, dan dongeng. Mendongeng dapat menjadi aktivitas berkomunikasi dengan anak yang mudah dan murah. Di samping itu, mendongeng juga dapat menjadi sarana efektif dalam menyampaikan pesan kepada anak. Anak tidak merasa dinasihati atau digurui oleh orang tua/pendidik karena tercipta suasana yang menyenangkan. Anak pun diposisikan sebagai subyek aktif yang ikut bermain peran dan/atau melibatkan seluruh inderanya untuk larut dalam cerita. Materi dongeng dapat diambil dari buku cerita anak-anak yang memuat pesan moral atau dari kejadian sehari-hari yang berlangsung di sekitar lingkungan tempat tinggal anak. Kegiatan mendongeng juga dapat menumbuhkan kecintaan anak pada buku karena anak menemukan banyak hal positif yang bisa diperoleh dengan membaca buku.

Dongeng dapat mempengaruhi perkembangan fisik, intelektual, dan mental anak. Ini disebabkan oleh keterlibatan seluruh indera anak ketika mendengarkan dongeng. Kecerdasan kognitif anak terasah lewat keterampilan berimajinasi dan menyimpulkan makna yang terkandung dalam cerita. Keterlibatan secara aktif dalam aktivitas mendongeng dapat memberikan pengalaman konkret pada anak sehingga tertanam kuat dalam struktur kognitif anak. Dongeng berpotensi memberikan sumbangsih besar bagi anak sebagai manusia yang memiliki jati diri yang jelas. Jati diri anak ditempa melalui lingkungan yang diusahakan secara sadar dan tidak sadar. Dongeng dapat digunakan sebagai sarana mewariskan nilai-nilai luhur kepribadian. Secara umum dongeng dapat membantu anak menjalani masa tumbuh kembangnya. Anak-anak dapat memahami pola drama kehidupan melalui tokoh dongeng. Melalui dongeng, anak-anak terlibat dalam alur cerita dongeng sehingga menumbuhkembangkan intelektualitasnya. Dongeng mampu membawa anak melanglang buana, memasuki dunia fantasi, menyeret mereka ke dunia antah-berantah, dan membayangkan berbagai “kehidupan lain” yang tidak ada di dekat mereka. Dalam hal ini, dongeng dapat menumbuhkan dan menggerakkan daya ciptanya. Di dalam dongeng ada pesan moral yang mengajarkan makna hidup yang penuh.

Namun, fenomenanya dongeng sudah mulai dilupakan. Banyak anak-anak yang tidak tahu dan tidak mengenal dongeng. Dongeng hampir pasti digantikan oleh televisi. Televisi bukan hanya merupakan hiburan, melainkan juga sebagai gaya hidup, pendamping hidup, pengasuh atau pengganti orang tua untuk menemani anak. Selain itu, pada saat ini anak-anak juga lebih suka memainkan permainan yang ada di komputer atau gawai daripada membaca buku dongeng. Karena itu kegiatan bercerita atau mendongeng diharapkan dapat menjadi *counter hegemony* terhadap hal tersebut dan menumbuhkan kebiasaan mendongeng di masyarakat khususnya anak-anak.

## 2. Berpidato

Menurut KBBI, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Secara umum, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Tujuan teks pidato adalah sebagai berikut.

- 1) Informatif: memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain;
- 2) argumentatif: meyakinkan pendengar;
- 3) rekreatif: membuat orang lain senang dengan teks pidato yang disampaikan karena bersifat menghibur;
- 4) persuasif: memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator atau orang yang berpidato.

Mungkin bagi sebagian orang, kesempatan berbicara di hadapan orang banyak terasa menakutkan. Namun, suatu saat nanti di sekolah atau saat sudah bekerja, ada saatnya seseorang diminta untuk berpidato, baik itu pidato resmi maupun pidato tidak resmi di hadapan teman-teman. Salah satu langkah yang bisa diterapkan sebelum berpidato adalah membuat teks pidato. Teks pidato adalah sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang akan disampaikan di depan umum.

### 3. Membaca dan Menulis Aksara Daerah

Indonesia memiliki ragam aksara atau tulisan tradisional. Aksara-aksara ini merupakan turunan dari aksara Brahmi dan digunakan masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan, terutama sebelum aksara Latin digunakan secara luas. Beberapa aksara yang sempat menghilang dari penggunaan masyarakat direvitalisasi lagi, sebagian dikembangkan oleh komunitas dan ada juga yang diajarkan di sekolah-sekolah.

Bukti tertua mengenai keberadaan aksara Nusantara yaitu berupa tujuh buah yupa (tiang batu untuk menambatkan tali pengikat sapi) yang bertuliskan prasasti mengenai upacara Waprakeswara yang diadakan oleh Mulawarmman, Raja Kutai di daerah Kalimantan Timur. Tulisan pada yupa-yupa tersebut menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Berdasarkan tinjauan pada bentuk huruf Aksara Pallawa pada yupa, para ahli menyimpulkan bahwa yupa tersebut dibuat pada sekitar abad ke-4.

Setidaknya sejak abad IV itulah bangsa Indonesia telah mengenal bahasa tulis yang terus berkembang mengikuti perkembangan bahasa lisan. Perkembangan ini dimulai terutama sejak bahasa daerah (misalnya Bahasa Melayu Kuno dan Bahasa Jawa Kuno) juga dituangkan dalam bentuk tulisan selain dari bahasa Sanskerta yang pada masa sebelumnya merupakan satu-satunya bahasa yang lazim dituliskan. Sejak abad XV aksara Nusantara berkembang pesat dengan ditandai beraneka-ragamnya aksara untuk menuliskan berbagai bahasa daerah hingga kemudian peranannya mulai tergeser oleh abjad Arab dan alfabet Latin.

Sebagaimana halnya dengan identitas budaya lokal di Nusantara, pada masa kini aksara Nusantara merupakan salah satu warisan budaya yang nyaris punah. Oleh karena itu, beberapa pemerintah daerah yang merasa tergugah untuk menjaga kelestarian budaya tersebut membuat peraturan-peraturan khusus mengenai pelestarian aksara daerah masing-masing. Hampir semua aksara daerah di Indonesia merupakan turunan aksara Pallawa yang berasal dari daerah India Selatan. Aksara Jawi, aksara Pegon, dan aksara Bilang-bilang merupakan turunan abjad Arab, sementara aksara Nagari berasal dari daerah India Utara. Baik aksara Pallawa maupun aksara Nagari adalah turunan dari aksara Brahmi yang merupakan induk semua aksara di Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Beberapa aksara daerah dinamai menurut susunan huruf-hurufnya atau menurut nama *abecedarium* aksara tersebut. Demikianlah maka aksara

Jawa modern dan aksara Bali disebut aksara hanacaraka; sedangkan aksara Sunda baku disebut aksara kaganga mengikuti *abecedarium* aksara Pallawa: *ka kha ga gha nga*.

#### 4. Cerita Pendek

Cerita pendek (cerpen) adalah cerita yang membatasi diri dalam membahas salah satu unsur fiksi dalam aspeknya yang terkecil. Kependekan sebuah cerita pendek bukan karena bentuknya yang jauh lebih pendek dari novel, tetapi karena aspek masalahnya yang dibatasi (Sumardjo, 1982:69). Sesuai dengan namanya, cerita pendek dapat diartikan sebagai cerita berbentuk prosa yang pendek (Suyanto, 2012). Menurut Edgar Allan Poe, sastrawan kenamaan Amerika, ukuran pendek di sini adalah selesai dibaca dalam sekali duduk, yakni kira-kira kurang dari satu jam. Beberapa pengertian cerita pendek yang telah dikemukakan oleh para ahli cerita pendek (cerpen) adalah sebuah karangan berbentuk prosa fiksi yang tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membacanya.

Cerita pendek juga memiliki pemendekan unsur-unsur pembentuknya sehingga kaya akan pemadatan makna. Panjang atau pendek sebuah cerita pendek juga tidak bisa ditetapkan. Pada umumnya panjangnya sebuah cerita pendek itu habis sekali, dua kali, atau tiga kali, tetapi ini juga bukan pegangan. Dapatlah kita katakan antara 500– 1.000, 1.500–2.000, hingga 10.000, 20.000, atau 30.000 kata.

Cerpen dapat terbentuk karena adanya unsur-unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik tersebut antara lain (1) plot atau alur, yakni rangkaian momen yang direka serta dijalin dengan saksama hingga menggerakkan jalur cerita melewati perjumpaan klimaks serta penyelesaian; (2) penokohan serta perwatakan, yakni cerita pengarang menggambarkan serta mengembangkan watak beberapa pelaku yang ada di dalam karyanya; (3) tema, yakni ide pokok menjadi dasar pengembangan cerita pendek. Tema satu cerita mencakup masalah, baik itu berbentuk problem kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan dan seterusnya. Untuk tahu tema satu cerita, dibutuhkan apresiasi menyeluruh pada beragam unsur karangan itu; (4) *setting* atau latar, yakni area serta waktu berlangsungnya cerita. Latar ini bermanfaat untuk memperkuat tema, menuntun watak tokoh, serta membangun situasi cerita; (5) sudut pandang yakni posisi pengarang saat membawakan cerita; dan (6) amanat, yakni pesan yang ingin disampaikan pengarang melewati karyanya

pada pembaca atau pendengar. Pesan dapat berbentuk harapan, anjuran, kritik, dan seterusnya.

## 5. Puisi

Puisi merupakan teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi merupakan salah satu karya sastra yang dipadatkan yang diberi irama yang indah yang dipadukan dengan kata-kata kiasan. Puisi bisa mengungkapkan berbagai hal, mulai dari rasa bahagia, berduka, cinta, dan kasih sayang. Dengan adanya puisi, seorang pembaca atau pendengar dapat merasakan seperti isi yang terkandung dalam puisi. Menurut Waluyo (2003: 1), puisi merupakan karya sastra yang dalam segi bahasa dapat dipadatkan, dipersingkat, dan diberikan irama dengan bunyi-bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias (imajinatif). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa puisi merupakan bentuk karya sastra yang dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan seorang penyair secara imajinatif dan disusun dengan unsur-unsur pembangunnya yaitu unsur fisik dan batin puisi.

Unsur pembangun puisi, menurut Waluyo (2003: 27) merupakan unsur yang meliputi unsur fisik dan unsur batin puisi. Unsur fisik merupakan unsur pembangun puisi yang nampak dalam bentuk susunan kata. Sementara, unsur batin merupakan unsur pembangun yang tidak tampak langsung dalam susunan kata. Unsur-unsur puisi tersebut dijabarkan sebagai berikut. Unsur fisik meliputi, (1) diksi, merupakan pemilihan kata dan termasuk inti penulisan puisi yang menjadi faktor penentu dalam kemampuan menciptakan karya puisi; (2) pengimajian, berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas, menimbulkan suasana hushush, membuat gambaran dalam pikiran dan penginderaan untuk memberikan bayangan visual penyair menggunakan gambaran-gambaran angan; (3) kata konkret, adalah kata-kata yang digunakan oleh penyair untuk menggambarkan suatu lukisan keadaan atau suasana batin untuk membangkitkan imaji pembaca; (4) bahasa figuratif atau majas, adalah bahasa kias yang digunakan penulis untuk menciptakan kesan tertentu; (5) rima atau irama, yaitu kesamaan nada atau bunyi. Rima bisa dilihat tidak hanya di akhir tiap larik atau baris, tetapi dapat juga terdapat di antara tiap kata dalam baris; dan (6) tata wajah atau tipografi, merupakan pengungkapan puisi secara grafis. Sementara unsur batin meliputi, (1) tema, adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan

dan membuat puisi, (2) perasaan (*feeling*), merupakan suasana/perasaan seorang yang diekspresikan ke dalam puisi, (3) nada, merupakan sikap seorang penyair terhadap pembacanya yang berkaitan dengan rasa dan makna, dan (4) amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang terhadap pembaca atau pendengar.

## 6. Tembang (Pupuh atau Geguritan atau Macapat)

Pupuh (Sunda) atau macapat (Jawa) merupakan nama kesatuan bentuk puisi tradisional yang telah ditentukan jumlah barisnya (*padalisan/gatra*) untuk setiap baitnya, dan telah tertentu pula jumlah suku kata (*guru wilangan*) serta vokal terakhir setiap baris (*guru lagu*). Di Sunda, jumlah pupuh ada 17 jenis yaitu Asmarandana, Balakbak, Dangdanggula, Durma, Gambuh, Gurisa, Jurudemung, Kinanti, Lambang, Ladrang, Magatru, Maskumambang, Mijil, Pangkur, Pucung, Sinom, dan Wirangrong. Sementara di Jawa ada yang paling umum ada 11 jenis tembang macapat.

Masing-masing pupuh atau tembang macapat mempunyai lagu untuk menyanyikannya, bahkan banyak yang lebih dari satu macam lagu. Pupuh Kinanti misalnya, mempunyai lebih dari 60 macam lagu, Asmarandana lebih dari 30 macam, dan sebagainya. Pupuh atau tembang macapat masih diajarkan di sekolah-sekolah. Karena setiap baitnya menggunakan bahasa daerah, materi ini dapat dijadikan bahan untuk revitalisasi bahasa daerah.

## 7. Lawakan Tunggal (Khusus untuk Guru)

Lawakan tunggal atau komedi tunggal (dari bahasa Inggris *stand-up comedy* makna harfiahnya ‘komedi berdiri’) adalah salah satu genre profesi melawak yang pelawaknya (kadang disebut komika, dari bahasa Inggris *comic*) membawakan lawakannya di atas panggung seorang diri, biasanya di depan pemirsa langsung, dengan cara bermonolog mengenai sesuatu topik. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut pelawak tunggal (bahasa Inggris: *stand-up comedian*), komika, atau komika berdiri (komik tunggal). Lawakan mereka biasanya direkam dan kemudian dijual melalui DVD, internet, atau televisi.

Komedi tunggal biasanya dilakukan oleh satu orang (ada juga yang berbentuk grup), membawakan materi yang orisinal atau dibuat sendiri (ada juga yang membawakan lawakan umum), dan biasanya dilakukan di kafe-kafe. Orang yang melakukannya dinamakan *stand-up comedian*, *stand-up comic*, atau hanya disebut *comic*. Biasanya para *comic* membawakan materi mereka

dengan gaya monolog walaupun ada beberapa jurus yang mengharuskan mereka berinteraksi dengan penonton.

*Stand-up comedy* sering disebut borongan (*ngabodor sorangan*), yaitu bentuk seni komedi atau melawak yang disampaikan secara monolog kepada penonton. Biasanya ini dilakukan secara langsung dan komedian akan melakukan penampilan tunggal. Meskipun disebut dengan *stand-Up comedy*, komedian tidaklah selalu berdiri dalam menyampaikan komedinya. Ada beberapa komedian yang melakukannya dengan duduk di kursi persis seperti orang yang sedang bercerita. Dalam masalah penampilan, pertunjukan ini dapat dikatakan tidak terlalu sulit mengaturnya. Begitu sederhananya bentuk pertunjukan ini sehingga seorang komedian dapat tampil meski dengan hanya memakai kaos oblong dan celana pendek. Meskipun begitu, tetaplah tidak mudah untuk menjadi pelaku *stand-up comedy*. Selain faktor harus bisa melucu, tekanan mental juga pasti akan hadir selama penampilan. Jika lelucon yang diberikan tidak dimengerti atau bahkan tidak dianggap lucu, para audiens tentu tidak akan tertawa dan yang lebih parah mereka malah mencibir komedian yang tampil.

## 8. Cerdas Cermat (*Calakan Telik*)

Cerdas cermat (*calakan telik*) dilakukan dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Materi cerdas cermat dapat diselaraskan dengan tingkatan berpikir siswa.

## 9. Materi Lainnya

Di samping ketujuh materi di atas, masih banyak materi lainnya yang dapat diterapkan sebagai model perlindungan bahasa dan sastra daerah. Setiap bahasa memiliki kekhasan dan bentuk kreativitas sendiri. Oleh karena itu, penyelenggara kegiatan revitalisasi dapat menyesuaikan dengan keadaan bahasa masing-masing.

Materi lainnya seperti olimpiade bahasa daerah juga perlu dipertimbangkan. Hampir setiap mata pelajaran memiliki kegiatan olimpiade, tetapi tidak dengan bahasa daerah. Kegiatan olimpiade bahasa daerah pernah diuji coba di wilayah Jawa Barat selama dua tahun berturut-turut dan mendapat sambutan baik dari para siswa dan guru. Ini merupakan ajang bagi para siswa untuk menguji kemampuan mereka berbahasa daerah secara menyeluruh yang meliputi kemahiran bertutur, mendengarkan, membaca, menyimak, dan pengetahuan umum budaya setempat.

### 3.3 Kemitraan

Keberhasilan revitalisasi bahasa dan sastra daerah ini sangat ditentukan oleh kerja sama erat dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap bahasa daerah. Oleh karena itu, perlu ada nota kesepahaman mulai dari hulu hingga hilir, antara lain pemerintah daerah, dinas pendidikan, dosen, guru, sastrawan, penyair, seniman, agamawan, tokoh, dan komunitas penggerak bahasa dan sastra. Setiap mitra yang tergabung memiliki peran masing-masing.

#### 1. Pemerintah Daerah

Perevitalisasi dapat melakukan koordinasi pada tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten/kota bahkan tingkat provinsi dengan dibuatnya peraturan/nota kesepahaman tentang perlindungan bahasa di daerah tersebut. Komitmen ini dapat ditunjukkan dengan pelaksanaan MoU pada tingkat Provinsi atau Tingkat Kabupaten Kota sehingga pada tingkat bawah dapat meneruskan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Menurut undang-undang yang berlaku, kepala daerah bertanggung jawab atas perlindungan bahasa daerah yang berada di daerahnya, pemerintah pusat hanya sebagai fasilitator dalam mendukung proses terlaksananya program revitalisasi ini melalui Badan Bahasa pada tingkat pusat dan balai/kantor bahasa pada tingkat daerah. Dalam hal ini, fasilitator memberikan gagasan atau konsep, yakni hal-hal yang dapat dilakukan terkait dengan pemerintah daerah yang menaungi dinas dengan berbagai bidang. Setingkat gubernur dan bupati dapat melakukan kebijakannya dalam mendukung pelaksanaan revitalisasi. Kebijakan yang dapat dilakukan, yaitu menganjurkan atau himbauan agar bahasa daerah digunakan di semua dinas pemerintahan di luar situasi acara resmi pemerintahan seperti rapat, seminar, diskusi terpumpun, serah terima jabatan, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat resmi pemerintahan lainnya.

#### 2. Lembaga Pendidikan (Sekolah dan Perguruan Tinggi)

Lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting sebagai mitra Badan Bahasa dan UPT di daerah dalam pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah. Pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah dengan memasukkannya sebagai muatan lokal di jenjang sekolah dasar dan menengah tentu harus dilakukan dengan dukungan pemerintah daerah dan dinas pendidikan di

wilayah tersebut. Kemitraan dengan perguruan tinggi terutama dikaitkan dengan pelaksanaan program MBKM Bahasa Daerah yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek. Program MBKM Revitalisasi bahasa daerah adalah program MBKM yang menyinergikan peran perguruan tinggi melalui keikutsertaan mahasiswa dalam program revitalisasi bahasa daerah yang dikonversi ke dalam 20 SKS. Mahasiswa mendapat pembekalan sebelum terjun langsung dalam pendampingan revitalisasi bahasa daerah.

### 3. Kemitraan dengan Lembaga atau Komunitas Seni Budaya

Lembaga seni budaya yang menjadi pusat berkumpulnya para seniman dan budayawan menjadi salah satu mitra yang tepat dalam pelaksanaan program revitalisasi bahasa dan sastra daerah. Seni dan budaya menjadi media yang cukup efektif dalam pelaksanaan program ini. Hampir di seluruh daerah, baik di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten dan kota terdapat organisasi yang menaungi seni dan budaya semisal Dewan Kesenian Daerah yang hampir pasti dapat ditemukan di hampir seluruh kota di Indonesia.

### 4. Kemitraan dengan Masyarakat Umum

Kemitraan dengan masyarakat umum dapat berupa kemitraan dengan komunitas ataupun perseorangan. Komunitas merupakan mitra penting dalam pelaksanaan untuk menyukseskan program revitalisasi bahasa ini. Begitu banyak komunitas yang tersebar di lingkup masyarakat, baik di lingkup perkotaan maupun di pedesaan. Komunitas juga dapat diambil dari yang resmi ataupun tidak resmi. Komunitas sanggar seni budaya, komunitas baca, komunitas peduli lingkungan, komunitas pemberantasan PEKAT, dst. Selain itu, keterlibatan orang tua di ranah keluarga sangatlah berperan penting karena keluarga merupakan benteng terakhir dalam pemertahanan bahasa. Dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah, setidaknya peran orang tua adalah komponen yang sangat penting dan perlu mendapatkan sosialisasi. Jika anak-anak hanya sekadar “diimbau” saja untuk mau menggunakan bahasa daerah di sekolah, tetapi orang tua di rumah tidak membantu untuk menyukseskan program ini, maka upaya revitalisasi akan kurang efektif.

### 3.4 Implementasi Revitalisasi Bahasa Daerah Model A

Hasil revitalisasi berbasis sekolah pada model A diharapkan dapat diimplementasikan dalam Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI). Festival Tunas Bahasa Ibu merupakan wahana perlombaan untuk meningkatkan kemahiran dan kreativitas siswa dalam berbahasa daerah. Selain itu, FTBI juga dapat meningkatkan sikap percaya diri dan bangga siswa terhadap kekayaan budaya berupa bahasa, sastra, dan aksara daerah, juga membangun kerja sama antarlembaga.

Adapun tahapan pelaksanaan revitalisasi bahasa dengan model A di sekolah adalah sebagai berikut.

#### 1. Rapat Koordinasi

Pada tahap ini, para pemangku kepentingan yang dinilai memiliki peranan penting dalam program revitalisasi bahasa dan sastra, seperti kalangan akademisi, birokrasi, praktisi, serta komunitas budaya, diundang untuk merumuskan dan mendesain program. Rapat koordinasi bertujuan untuk mendesain program revitalisasi sehingga dihasilkan gambaran utuh dari program yang akan dilaksanakan. Dalam rapat koordinasi diundang para ketua KKG SD dan Ketua MGMP mulok bahasa daerah tingkat kabupaten/kota dan perwakilan dari dinas pendidikan kabupaten/kota di wilayah model A. Selain itu, diundang para akademisi dan praktisi yang akan dijadikan narasumber kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Diundang pula para penggiat budaya serta perwakilan komunitas yang selama ini berperan dalam upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah yang akan dimintai saran dan pendapatnya terhadap program revitalisasi yang akan dilaksanakan.

Rapat koordinasi diharapkan menghasilkan draft rancangan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Draft yang dihasilkan antara lain berupa desain program pelatihan guru master yang bersifat *training of trainer* (ToT), serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pasanggiri sebagai sarana evaluasi program.

#### 2. Sosialisasi dan Pelatihan Guru Master

Tahap ini mengundang perwakilan dinas pendidikan kabupaten/kota, pengawas, dan guru master untuk menyosialisasikan desain program serta memberikan pelatihan kebahasaan untuk revitalisasi bahasa daerah

di lingkungan pendidikan. Sosialisasi program kegiatan dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan revitalisasi bahasa daerah bagi penutur muda kepada pihak-pihak terkait. Sasaran kegiatan ini terutama perwakilan dinas pendidikan kabupaten/kota di wilayah model A, para pengawas sekolah, serta guru master yang ditunjuk oleh KKG dan MGMP kemudian dilakukan pelatihan terhadap guru master yang ditunjuk MGMP dan KKG. Materi pelatihan berkaitan dengan berbagai aspek keterampilan berbahasa (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis) yang diintegrasikan dengan struktur kurikulum bahasa daerah yang berlaku di sekolah saat ini.

Peran yang diharapkan dari dinas pendidikan kabupaten/kota adalah mengawal program ini dan memfasilitasi program revitalisasi bahasa daerah bagi penutur muda, terutama pada saat pelaksanaan implementasinya di satuan pendidikan. Sementara itu, para pengawas sekolah bertanggung jawab untuk membina para guru master dan guru imbasan serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program. Materi pelatihan disampaikan oleh para narasumber yang telah ditunjuk oleh balai/kantor bahasa sesuai dengan kompetensi dan profesionalitasnya.

### **3. Diseminasi dan Implementasi di Sekolah**

- 1) Pada tahap ini, guru master sudah dilatih melakukan pengimbasan kepada guru lainnya melalui forum MGMP. Para guru kemudian mengimplementasikan materi revitalisasi bahasa daerah kepada para siswanya di tingkat satuan pendidikan.
- 2) Guru master yang telah mengikuti sosialisasi dan pelatihan berkewajiban menyampaikan kembali materi pelatihan kepada seluruh guru mulok di daerah masing-masing. Pelatihan di daerah ini merupakan upaya pengimbasan program revitalisasi bahasa daerah bagi penutur muda di tingkat kabupaten/kota.
- 3) Guru master memaparkan alur program secara utuh sehingga timbul minat partisipasi dari berbagai kalangan untuk ikut melibatkan diri pada program revitalisasi bahasa daerah bagi penutur muda.
- 4) Guru peserta pelatihan di tingkat kabupaten/kota kemudian mengimplementasikan materi yang didapatkannya di tingkat satuan pendidikan dan mempersiapkan siswa-siswinya dalam program evaluasi dan perlombaan.

- 5) Dinas pendidikan memfasilitasi kegiatan pengimbasan di kabupaten/kota masing-masing dengan mengundang guru-guru SMP dan SD melalui forum MGMP dan KKG.

#### **4. Evaluasi Program**

Berikut ini adalah langkah-langkah evaluasi model revitalisasi bahasa dan sastra daerah di sekolah.

- 1) Setelah dilakukan pelatihan kepada guru mulok di tingkat provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota bersama forum KKG dan MGMP membuat program evaluasi berupa perlombaan Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat SD dan SMP. Perlombaan ini adalah bentuk dari evaluasi program revitalisasi bahasa daerah bagi penutur muda.
- 2) Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis lomba mengacu kepada draf yang telah disusun pada saat rapat koordinasi.
- 3) Lomba dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten/kota yang kemudian dilanjutkan ke tingkat provinsi.
- 4) Lomba di tingkat kabupaten/kota difasilitasi oleh dinas pendidikan kabupaten/kota yang berkoordinasi dengan forum KKG SD dan MGMP mulok bahasa daerah di tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, lomba di tingkat provinsi difasilitasi oleh balai/kantor bahasa yang berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi serta MGMP mulok bahasa daerah tingkat provinsi.
- 5) Para pemenang lomba tingkat kabupaten/kota dikirim sebagai perwakilan untuk mengikuti lomba di tingkat provinsi.

### **3.5 Pengendalian Mutu**

Agar revitalisasi bahasa dan sastra sesuai dengan perencanaan, diperlukan pengendalian mutu untuk memantau, mengukur, dan melakukan perbaikan atas rangkaian kegiatan yang sedang dan telah dilakukan. Pengendalian mutu melingkupi pemantauan, evaluasi, umpan balik atau tanggapan publik, serta pelaporan kegiatan.

#### **1. Pemantauan**

Dalam melakukan aksi revitalisasi bahasa dan sastra, perevitalisasi balai/kantor bahasa atau pihak lain sebagai pelaksana dapat dipantau oleh beberapa pihak. Pemantauan ini dilakukan untuk melihat dan menilai kesesuaian aksi

kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra dengan prosedur yang diusulkan dalam rencana kegiatan. Pihak yang dapat memantau aksi revitalisasi bahasa dan sastra adalah sebagai berikut.

- 1) Pendamping aksi revitalisasi bahasa dan sastra daerah (perevitalisasi Pusat Pengembangan dan Pelindungan);
- 2) supervisor balai/kantor bahasa (kepala balai/kantor bahasa);
- 3) supervisor Pusat Pengembangan dan Pelindungan (kepala subbidang atau kepala bidang);
- 4) supervisor dinas pendidikan provinsi untuk pemantauan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) supervisor dinas pendidikan kabupaten/kota untuk pemantauan guru master ditugaskan mengikuti kegiatan sosialisasi dan diseminasi.

## 2. Evaluasi

Hal yang harus diperhatikan sebelum dan setelah pelaksanaan aksi kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra daerah adalah evaluasi. Evaluasi yang dilakukan sebelum aksi diperlukan agar aksi dapat dibuat dengan lebih jelas, rapi, dan menarik sesuai dengan tujuan revitalisasi bahasa dan sastra daerah. Sementara itu, evaluasi yang dilakukan setelah aksi diperlukan untuk mengoreksi kekurangan dan membuat rekomendasi tindak lanjut revitalisasi. Dalam revitalisasi bahasa dan sastra ini, evaluasi aksi dilakukan terhadap beberapa proses berikut.

- 1) Penyeleksian proposal;
- 2) pelaksanaan survei dan koordinasi;
- 3) pembelajaran/pelatihan; dan
- 4) festival/pertunjukan.

## 3. Tanggapan Publik

Setelah melakukan kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra daerah, perevitalisasi dapat mengadakan survei untuk mengetahui umpan balik (*feedback*) dan tingkat kepuasan dari berbagai pihak. Pengumpulan tanggapan publik dapat dilakukan dengan membuat formulir kuesioner secara daring yang mencakup (1) kepanitiaan; (2) kepesertaan; (3) penjurian; dan (4) pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh.

#### 4. Pelaporan Kegiatan

Laporan disusun oleh perevitalisasi balai/kantor bahasa selaku pelaksana dan perevitalisasi Pusbanglin selaku pendamping. Adapun tahapan penyusunan laporan sebagai berikut.

- 1) Pelaksana menyusun laporan setiap tahapan kegiatan revitalisasi (survei dan koordinasi, pelaksanaan revitalisasi, dan pertunjukan/pentas revitalisasi). Laporan harus melampirkan data yang berupa foto digital, rekaman audio, rekaman audiovisual, dan/atau bahan ajar/bahan pelatihan.
- 2) Pendamping memverifikasi dan memberikan tanggapan terhadap laporan pelaksanaan setiap tahapan kegiatan revitalisasi.
- 3) Pelaksana menyusun draf laporan akhir kegiatan revitalisasi dan bahan presentasi seminar hasil revitalisasi.
- 4) Pendamping melakukan verifikasi terhadap draf laporan akhir kegiatan revitalisasi, termasuk bahan presentasi seminar hasil revitalisasi dalam bentuk salindia.
- 5) Pelaksana dan pendamping melakukan presentasi draf laporan akhir kegiatan pada seminar hasil revitalisasi di daerah yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat/adat, peneliti, dan pegiat bahasa dan sastra.
- 6) Pusbanglin melaksanakan seminar nasional hasil revitalisasi terpilih di balai/kantor bahasa.
- 7) Pendamping memperbaiki draf laporan akhir berdasarkan hasil seminar nasional.





## BAB IV

# PENUTUP

Program revitalisasi bahasa yang baik sangat bergantung dari sejauh mana kita dapat melihat dan mempertimbangkan berbagai faktor yang menjadi pemicu seorang individu dalam sebuah komunitas untuk dapat memilih bahasa apa yang akan mereka gunakan. Revitalisasi Model A ini diharapkan dapat digunakan sebagai sebuah pendekatan yang bersifat dinamis dan fleksibel. Dengan kata lain, pendekatan ini mencoba mewadahi berbagai situasi sebagai reaksi atas hasil analisis kebutuhan bagi bahasa-bahasa dengan jumlah penutur yang besar yang ada di Indonesia ini.

Meskipun demikian, pada hakikatnya pendekatan Revitalisasi Model A ini memprioritaskan revitalisasi berbasis sekolah. Namun, pedoman ini juga disusun dengan tidak kaku sehingga dapat juga memfasilitasi pendekatan revitalisasi berbasis komunitas dan masyarakat jika memang bahasa tersebut sesuai dan bisa menerapkan pendekatan yang komunitas atau masyarakat.

Harapan ke depan dari penyusunan ini adalah agar masyarakat penutur dapat lebih terwadahi sehingga mereka dapat memberikan tempat yang lebih untuk penggunaan bahasa daerah mereka sendiri. Biar bagaimanapun, nasib masa depan bahasa daerah itu ada di tangan penuturnya sendiri. Pemerintah hanya bisa memfasilitasi dan membantu mendorong penggunaan bahasa tersebut ke ranah yang lebih tinggi dan mencegah terjadinya bahasa ke arah rentan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderbeck, K. 2015. "Portraits of Indonesian Language Vitality". *ICAL 2012 Proceedings*, 2, 19-47.
- Badan Bahasa. (2019). Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia. Website. Diakses melalui <https://petabahasa.kemdikbud.go.id/index.php>.
- Basuningtyas, D.I.A. (2014). Code switching by three young Indonesian-English bilinguals. *Unpublished Master's Thesis*. Atma Jaya Catholic University of Indonesia.
- Crystal, David. 2000. *Language Death*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Crystal, David. 2003. *English as a Global Language, 2th edition*. Oxford: Oxford University.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ethnologue. (2020). Indonesia. *Website*. Diakses melalui <https://www.ethnologue.com/country/ID>
- Evans, N. 2009. *Dying Words: Endangered Languages and What They Have To Tell Us*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Ferguson, C.A. 1959. "Diglossia" dalam *Word*, Vol. 15.
- Fishman, Joshua A. 1967. "Bilingualism with and Without Diglossia; Diglossia With and Without Bilingualism" dalam *Journal of Social Issues*, Volume XXIII, Number 2, 1967. 67. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1967.tb00573.x>
- Fishman, Joshua A. 1991. *Reversing Language Shift: Theoretical and Empirical Foundations of Assistance to Threatened Languages*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Grenoble, Lenore A. 2021. *Revitalizing endangered languages: a practical guide* (Eds: Justyna Olko, Julia Sallabank). School of Oriental and African Studies. New York : Cambridge University Press. DOI 10.1017/9781108641142.

- Grenoble, Lenore A. dan Lindsay J. Whaley. 2006. *Saving Languages: An Introduction to Language Revitalization*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Harimansyah, Ganjar. 2017. *Pedoman Konservasi dan Revitalisasi Bahasa*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Hinton, L. and Hale, K. (ed.) 2001. *The Green Book of Language Revitalization in Practice*. San Diego: Academic Press.
- Ibrahim, Gufran A. 2011. “Bahasa Terancam Punah: Fakta, Sebab-Musabab, Gejala, dan Strategi Perawatannya”. *Linguistik Indonesia*, 29(1), 35-52.
- Ibrahim, Gufran A. 2013. “Triglosia Indonesia: Merumuskan Kembali Relasi Antarbahasa untuk Keindonesiaan.” *Pidato pengukuhan Guru Besar dalam bidang Antropolinguistik*, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Khairun, Ternate, 5 Desember 2013.
- Ibrahim, Gufran A. 2015. “Indonesia: Diglosia atau triglosia.” *Prosiding Seminar Nasional Sosiolinguistik-Dialektologi: “Kajian Sosiolinguistik dan Dialektologi dalam Konteks Masyarakat dan Budaya di Indonesia”*, hlm.136-155. Departemen Linguistik FIB UI bekerja sama dengan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya FIB UI.
- Ibrahim, Gufran A. dan Mayani, L.A. 2018. “Perencanaan Bahasa di Indonesia Berbasis Triglossia. *Linguistik Indonesia*, 36(2), 107-116. DOI: <https://doi.org/10.26499/li.v36i2.77>.
- Kubota, R., dan Ward, L. 2000. “Exploring Linguistic Diversity Through World Englishes”. *The English Journal*, 89(6), 80-86.
- Nurgiyantoro, B. (2005). *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Onishi, N. (2010, 25 Juli). As English spreads, Indonesians fear for their language. *The New York Times*. Diakses melalui <https://www.nytimes.com/2010/07/26/world/asia/26indo.html>.
- Steinhauer, H. 1994. “The Indonesian Language Situation and Linguistics: Prospects and Possibilities” dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 150 Volumes of Bijdragen; A Backward Glimpse and a Forward Glimpse* 150(4). Leiden, 755- 784.

- Simons, Gary F. 2019. “Two Centuries of Spreading Language Loss” dalam *Proceedings of the Linguistic Society of America* 4. 27 (2019), 1–12. <https://doi.org/10.3765/plsa.v4i1.4532>.
- Sneddon, J. 2003. Diglossia in Indonesia. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 159(4), Leiden, 519-549. DOI: <https://www.jstor.org/stable/27868068>.
- Sumardjo, J. (1982). *Apresiasi Sastra*. Jakarta: Gramedia.
- Suyanto, S. (2012). Pendidikan karakter untuk anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.21831/jpa.v1i1.2898>.
- Thomason, Sarah. 2015. *Endangered Languages: An Introduction*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Warami et al. 2020. The codification of native Papuan languages. *Journal of Arts and Humanities (JAH)*, Vol. 09, No. 10: 40-48. DOI <https://doi.org/10.18533/jah.v9i10.1990>
- Waluyo, H.J. 2003. *Teori dan Apresiasi Puisi*. Jakarta: Erlangga.
- Wood, Johnny. 2022. “1.500 Endangered Languages Could Disappear by The End of The Century” dalam <https://www.weforum.org/agenda/2022/01/languages-endangered-diversity-loss-spoken/>. Diakses 31 Maret 2022.





Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi